

RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU



2025 - 2029

**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN – BATU**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME karena atas rahmat dan hidayah-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Tahun 2025–2029 dapat terselesaikan dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman arah pembangunan sumber daya manusia pertanian dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mendorong regenerasi petani melalui pelatihan dan penguatan kelembagaan.

Renstra BBPP Batu 2025–2029 dirancang sejalan dengan Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Penyusunan ini juga mempertimbangkan kondisi aktual sektor pertanian, tantangan global perubahan iklim dan krisis pangan, serta kebutuhan nasional untuk membangun SDM pertanian yang profesional, adaptif, inklusif, dan berdaya saing global.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kerja sama dalam proses penyusunan Renstra ini. Kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan Renstra ini tersusun secara komprehensif dan aplikatif.

Harapan kami, dokumen Renstra BBPP Batu 2025–2029 dapat menjadi acuan bersama dalam mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat posisi sektor pertanian Indonesia dalam menghadapi dinamika pembangunan nasional maupun tantangan global.

Kepala BBPP Batu,



Dr. Djodik Romadi, SST, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	2
1.3. Capaian Kinerja BBPP Batu Tahun 2020 - 2024	14
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	23
2.1. Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Pertanian	23
2.2. Visi, Misi dan Tujuan BPPSDMP Tahun 2025 - 2029	27
2.3. Sasaran Program BPPSDMP	31
2.4. Sasaran dan Indikator Kinerja BBPP Batu Tahun 2025 – 2029	32
2.5. Manajemen Risiko BBPP Batu	32
2.6. Pohon Kinerja BBPP Batu	35
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	38
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029	38
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPPSDMP Tahun 2025 - 2029	41
3.3. Strategi Operasional BBPP Batu Tahun 2025 - 2029	42
3.4. Kerangka Regulasi	43
3.5. Kerangka Kelembagaan	44
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	45
4.1. Target Kinerja BBPP Batu Tahun 2025 – 2029	45
4.2. Kerangka Pendanaan BBPP Batu Tahun 2025-2029	47
BAB V. PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. <i>Internal Factors Analysis Summary</i> (IFAS)	10
Tabel 2. <i>External Factors Analysis Summary</i> (IFAS)	11
Tabel 3. Matrik Manajemen Resiko BBPP Batu	33
Tabel 4. Target Kinerja BBPP Batu Tahun Tahun 2025 – 2029	46
Tabel 5. Kerangka Pendanaan BBPP Batu Tahun 2025-2029	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Data Pegawai PNS BBPP Batu berdasarkan pendidikan terakhir periode Tahun 2020-2024.....	3
Gambar 2. Data Widyaiswa BBPP Batu berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2020 – 2024.....	4
Gambar 3. Kuadran Strategis SWOT BBPP Batu	12
Gambar 4. Capaian Realisasi Peserta Pelatihan Tahun 2020 -2024.....	14
Gambar 5. Capaian Realisasi Peserta Sertifikasi Profesi Tahun 2020 - 2024	15
Gambar 6. Capaian Realisasi Penumbuhan & Penguatan P4S Tahun 2020–2024	16
Gambar 7. Capaian Realisasi Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2024	17
Gambar 8. Capaian Realisasi Koordinasi (koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan) Tahun 2020 – 2024.....	18
Gambar 9. Capaian Realisasi Peserta Pelatihan Kerjasama PNBK Tahun 2020-2024	19
Gambar 10. Capaian Realisasi Jumlah Peserta Kunjungan dan Magang / PKL BBPP Batu Tahun 2020 - 2024	20
Gambar 11. Jumlah P4S Binaan BBPP Batu berdasarkan Kelas Klasifikasi Tahun 2020 - 2024	21
Gambar 12. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA BBPP Batu Tahun 2020 - 2024	21
Gambar 13. Target dan Realisasi Penerimaan PNBK BBPP Batu Tahun 2020-2024	22
Gambar 14. Summary Pohon Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2025 - 2029	35
Gambar 15. Kontribusi BPPSDMP pada Pohon Kinerja Kementerian Pertanian...	36
Gambar 16. Rumah Strategi Kementerian Pertanian	32

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Indonesia saat ini merupakan negara dengan jumlah penduduk 297 juta jiwa. Di perkiraan pada tahun 2030 – 2040 mendatang, Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Hal ini tentunya akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi warganya. Pertumbuhan populasi dunia yang kian meningkat mendorong terjadinya lonjakan kebutuhan pangan secara global, lonjakan tersebut tercermin dari meningkatnya permintaan pangan pokok serta produk pangan yang lebih sensitif terhadap pertumbuhan pendapatan di negara – negara berkembang.

Situasi pangan global di hadapkan pada berbagai tantangan, di antaranya meliputi perubahan iklim, pertumbuhan populasi global yang pesat serta meningkatnya ketegangan geopolitik dan perang dagang antar negara. Perkembangan situasi pangan global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, menyebabkan Indonesia perlu mengambil langkah antisipatif dan memperkuat sistem ketahanan pangan Nasional untuk menghindari dampak buruk dari potensi krisis pangan global.

Dalam menjawab tantangan yang ada, Agenda Pembangunan Nasional tahun 2025–2029 (Astacita) melalui RPJMN 2025–2029 yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025, menekankan pentingnya peningkatan produktivitas sektor unggulan termasuk pertanian, serta peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Inisiatif ini diperkuat oleh Inpres Nomor 3 Tahun 2025 yang mendorong transformasi sistem penyuluhan menuju pertanian modern berbasis teknologi, melalui penguatan kelembagaan serta pendayagunaan penyuluh di semua tingkat pemerintahan.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) memegang peran sentral dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) pertanian, melalui Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di bawahnya, BPPSDMP menyelenggarakan pendidikan vokasi, pelatihan, penyuluhan, literasi pertanian, serta fasilitasi kelembagaan petani. Namun, efektifitas kelembagaan ini masih menemui sejumlah tantangan, seperti keterbatasan jumlah dan distribusi SDM, infrastruktur yang belum merata serta krisis regenerasi petani.

Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari BPPSDMP merespons secara komprehensif terhadap tantangan tersebut ke dalam Rencana Strategis (Renstra) BBPP Batu Tahun 2025– 2029. Dokumen Renstra lingkup BBPP Batu ini disusun sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan mencapai

tujuan organisasi 5 (lima) tahun ke depan guna mempercepat transformasi SDM pertanian yang adaptif, inklusif, profesional, dan berdaya saing global.

Dalam menyusun Renstra ini, BBPP Batu telah melakukan analisis terhadap capaian kinerja yang telah di raih pada periode sebelumnya sebagai fondasi untuk percepatan pencapaian sasaran dan target kinerja pada periode selanjutnya. Permasalahan dan kendala yang menjadi tantangan merupakan dasar untuk menentukan langkah antisipasi dalam mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan. Sasaran akhirnya adalah mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta peningkatan kesejahteraan petani melalui kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan Permentan Nomor 11 Tahun 2025, BBPP Batu mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian, peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

BBPP Batu melaksanakan mandat BPPSDMP untuk menyiapkan SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha. Mandat ini dijalankan melalui fungsi utama yaitu peningkatan kapasitas melalui pelatihan. Hal tersebut menjadi potensi penting dalam menjawab tantangan pembangunan pertanian, terutama dalam menghadapi transformasi teknologi dan kebutuhan regenerasi petani khususnya di bidang peternakan.

1.2.1. Potensi

a. Aspek Geografis Wilayah.

BBPP Batu berlokasi di Jl. Songgoriti No 24 Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Secara topografi, BBPP Batu terhampar di kaki Gunung Banyak dengan ketinggian tempat 900 meter diatas permukaan laut dan berada di wilayah Kota Wisata Batu.

Ditinjau dari kondisi suhu udara, kawasan BBPP Batu memiliki suhu udara antara 18 °C – 24 °C, dengan curah hujan berkisar 122,04 mm/tahun menjadikan kawasan BBPP Batu memiliki udara yang sejuk. Lokasi BBPP Batu mudah dijangkau dan hanya berjarak sekitar 31 Km dari Bandara Abdurrahman Saleh Malang dan berjarak 94 KM dari bandara Internasional Juanda Surabaya. Kondisi geografis tersebut mendukung BBPP Batu sebagai tempat berlatih yang nyaman dan juga sebagai lokasi eduwisata di bidang peternakan.

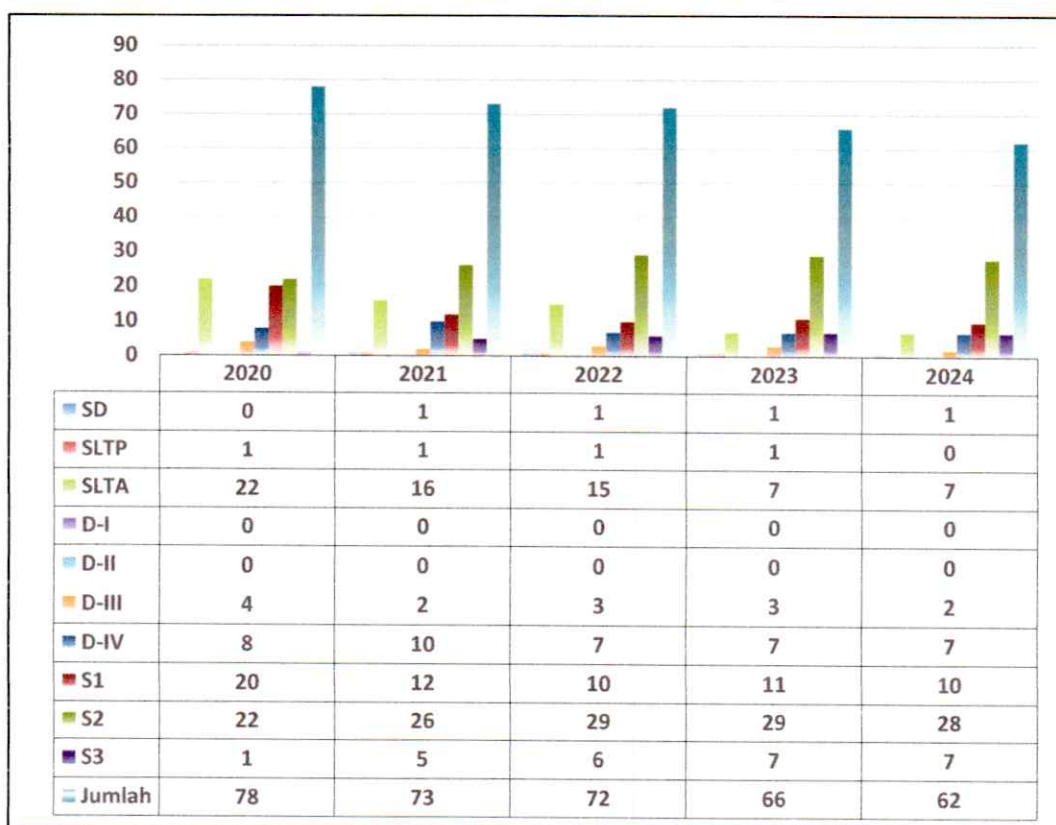
b. Aspek Lahan.

BBPP Batu memiliki lahan seluas 5 Ha dengan tingkat kemiringan lahan berkisar antara 25-40% dengan jenis tanah *inceptisol*. Jenis tanah ini didominasi oleh endapan material vulkanik. Tanah vulkanik bersifat subur sehingga cocok untuk ditanami rumput unggul dan tanaman pakan ternak serta tersedianya sumber air pegunungan yang penting untuk kegiatan peternakan dan kebersihan kandang.

c. Aspek Ketenagaan

BBPP Batu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya. Pada akhir periode Tahun 2024, jumlah pegawai di BBPP Batu sebanyak 102 orang pegawai dengan rincian 62 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 40 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

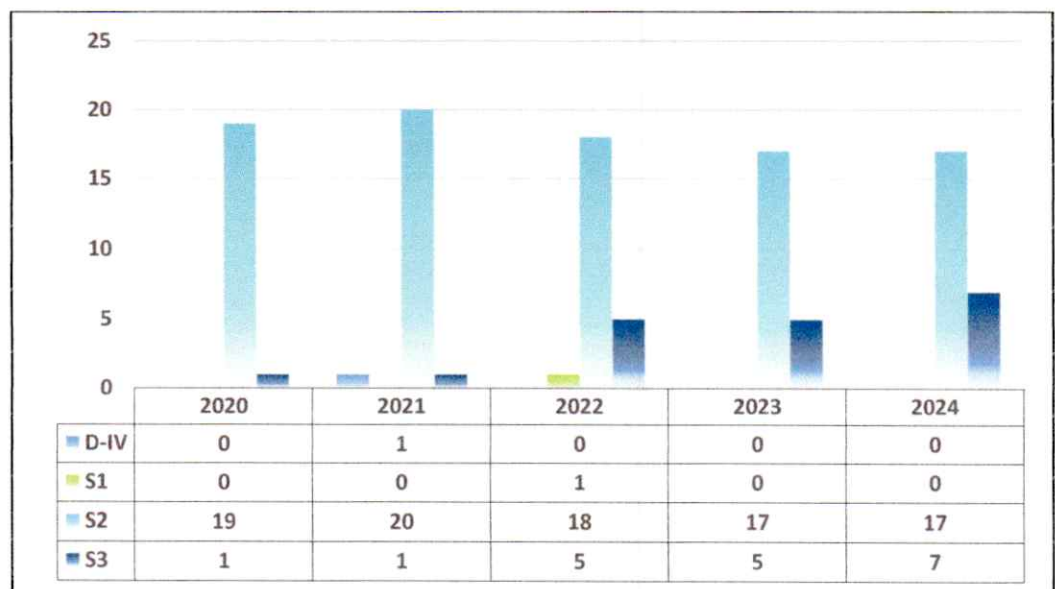
Adapun Jumlah Pegawai BBPP Batu berdasarkan tingkat pendidikan pada periode tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Data Pegawai PNS BBPP Batu berdasarkan pendidikan terakhir Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa pegawai PNS BBPP Batu mengalami peningkatan kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan terakhir dari tahun ke tahun, hal tersebut menunjukkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang baik untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

BBPP Batu, dalam menyiapkan SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha didukung oleh tenaga fungsional widyaiswara yang bertugas meningkatkan kompetensi aparatur dan non aparatur di bidang peternakan melalui pelatihan. Adapun jumlah Widyaiswara BBPP Batu berdasarkan pendidikan terakhir periode 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Data Widyaiswara BBPP Batu berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2020 -2024

Berdasarkan gambar 2, menunjukkan bahwa jenjang pendidikan terakhir widyaiswara BBPP Batu telah sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan angka kreditnya, dimana untuk pendidikan terakhir Widyaiswara harus jenjang Strata 2.

d. Aspek Kelembagaan

Penguatan aspek kelembagaan Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu terus dilakukan setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada capaian periode 2020 – 2024 antara lain :

1. Memiliki sertifikat ISO 9001 : 2015 (Sistem Manajemen Mutu)
2. Memiliki sertifikat ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan)

3. Memiliki pelatihan terakreditasi yang ditetapkan pada 10 Desember 2024 dengan rincian :
 - Pelatihan Paramedik Veteriner, terakreditasi "Sangat Baik"
 - Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak, terakreditasi "Baik"
 - Pelatihan Pengolahan Daging, terakreditasi "Baik"
4. Memiliki Perpustakaan yang telah terakreditasi "A"
5. Meraih penghargaan pemeringkatan keterbukaan informasi public tahun 2024 sebagai Kategori eselon II predikat Informatif.
6. Meraih penghargaan Peringkat II Kategori Satker Pengguna KKP terbaik Periode Triwulan III TA 2023.
7. Meraih penghargaan Peringkat III Kategori Satker Pengguna KKP terbaik TA 2023 Satker Mitra Bank Mandiri.
8. Meraih penghargaan Peringkat III Kategori Satker dengan pengajuan SPM gaji Induk Tercepat Periode Triwulan IV 2023
9. Meraih penghargaan Peringkat II Kategori Satker dengan Penyampaian LPJ Tercepat dan Terakurat Satker Piloting Periode Triwulan IV TA 2023.
10. Meraih Penghargaan Peringkat Kedua Satker dengan perolehan pokok lelang dan PNBPN terbesar tahun 2023
11. Meraih penghargaan Peringkat Kedua Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA.2023 Lingkup BPPSDM Kementan.
12. Meraih penghargaan pemeringkatan keterbukaan informasi public tahun 2023 sebagai Kategori eselon II predikat Informatif.
13. Memiliki Sertifikat Rekor Indonesia-Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Agustus 2022 atas rekor Serial Pelatihan Petani dan Penyuluh Peserta Terbanyak
14. Meraih Penghargaan dari Kementerian Pertanian atas peran aktif dalam menyukseskan TOT Widyaiswara, Dosen, Guru, dan Penyuluh Pertanian serta Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh Periode Januari s.d maret 2022.
15. Memiliki sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) atas Laboratorium pakan yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai Laboratorium Penguji dengan menerapkan secara konsisten, berlaku sampai dengan 13 Desember 2020.

1.2.2. Permasalahan dan Tantangan

Dalam melaksanakan mandat untuk penyiapan SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha, BBPP Batu dihadapkan pada berbagai permasalahan dan juga tantangan yang mempengaruhi pencapaian kinerja lembaga. Permasalahan dan tantangan ini selain berasal dari internal namun juga eksternal. Adapun identifikasi lingkungan strategis BBPP Batu tahun 2025-2029 baik internal maupun eksternal adalah sebagai berikut:

1. Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Dukungan Regulasi dan Wilayah Kerja Nasional;

BBPP Batu memiliki landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pelatihan pertanian serta memiliki mandat wilayah kerja nasional khususnya untuk pelatihan unggulan bidang persusuan dan teknologi hasil ternak. Dukungan regulasi dan kewenangan nasional ini menjadi kekuatan strategis dalam meningkatkan peran BBPP Batu sebagai lembaga pelatihan peternakan yang berdaya saing dan diakui secara luas

2. Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Profesional;

BBPP Batu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, baik pegawai ASN maupun non-ASN. Selain itu tersedia tenaga pengajar/widyaiswara yang memiliki keahlian di bidangnya serta tenaga pelatihan yang telah memiliki sertifikat *Training Officer Course* (TOC) dan *Method of Training* (MOT). Kondisi ini menjadi modal utama dalam menjamin kualitas penyelenggaraan pelatihan.

3. Sarana Prasarana dan Lingkungan Pelatihan yang Mendukung;

BBPP Batu memiliki sarana dan prasarana pelatihan yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan. Selain itu, lokasi BBPP Batu yang strategis, mudah dijangkau, serta didukung kondisi lingkungan yang nyaman memberikan suasana belajar yang kondusif dan efektif.

4. Sistem Mutu dan Program Pelatihan yang Terstandar;

BBPP Batu memiliki program pelatihan yang telah terakreditasi serta menerapkan sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016. Standarisasi ini menunjukkan komitmen lembaga dalam menjaga kualitas layanan pelatihan dan tata kelola organisasi yang baik.

5. Jejaring Kerjasama dan Layanan Sertifikasi Kompetensi;

BBPP Batu memiliki jejaring kerjasama yang baik dengan berbagai dinas, institusi, dan lembaga dalam penyelenggaraan pelatihan. Selain itu, tersedia Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan berbagai skema sertifikasi yang dapat dimanfaatkan oleh aparatur maupun non-aparatur untuk meningkatkan kompetensi dan pengakuan profesional.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Keterbatasan Lahan untuk Pengembangan Sarana Praktik;

Kepemilikan lahan BBPP Batu masih berada di bawah standar minimal luas lahan balai pelatihan yaitu 10 hektar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan pengembangan instalasi kandang praktik serta penyediaan hijauan pakan ternak sebagai sarana pembelajaran berbasis praktik.

2. Sarana dan Prasarana Pelatihan yang Belum Sepenuhnya Modern;

Sebagian sarana dan prasarana pelatihan yang dimiliki BBPP Batu belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pelatihan terkini. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran praktik serta daya saing lembaga pelatihan di tingkat nasional.

3. Pengembangan Kompetensi SDM yang Belum Merata;

Kesempatan peningkatan kompetensi bagi widyaiswara dan tenaga pelatihan belum merata sehingga masih terdapat kesenjangan kapasitas antar SDM. Kondisi ini dapat mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan pelatihan serta kualitas layanan pembelajaran yang diberikan kepada peserta

4. Keterbatasan Kompetensi SDM dalam Penguasaan Teknologi dan Bahasa Asing;

Sebagian widyaiswara dan tenaga pelatihan masih memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi, perkembangan teknologi baru seperti *Artificial Intelligence* (AI), serta kemampuan bahasa asing. Hal ini menjadi kendala dalam mengikuti perkembangan metode pembelajaran modern serta dalam menjalin kerjasama pelatihan berskala nasional maupun internasional.

5. Kompetensi Teknis dan Jejaring Kerjasama yang Belum Optimal;
Belum semua widyaiswara memiliki kompetensi teknis tertentu seperti penguasaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Selain itu, jejaring kerjasama dan promosi program pelatihan unggulan BBPP Batu juga belum optimal, sehingga pemanfaatan potensi balai sebagai pusat pelatihan nasional belum sepenuhnya maksimal.

2. Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Meningkatnya Kebutuhan SDM Pertanian yang Kompeten;
Peningkatan kebutuhan sumber daya manusia pertanian yang kompeten dalam mendukung program ketahanan pangan nasional menjadi peluang strategis bagi BBPP Batu untuk memperluas peran dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi di bidang peternakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan pertanian akan tetap menjadi kebutuhan utama dalam pembangunan sektor pertanian.
2. Meningkatnya Kebutuhan SDM Pertanian yang Tersertifikasi;
Tuntutan terhadap tenaga kerja pertanian yang memiliki sertifikasi kompetensi semakin meningkat, baik bagi aparatur maupun non-aparatur. Kondisi ini menjadi peluang bagi BBPP Batu untuk mengoptimalkan peran sebagai lembaga pelatihan sekaligus Tempat Uji Kompetensi (TUK) dalam menghasilkan tenaga kerja peternakan yang profesional dan diakui kompetensinya.
3. Peluang Kerjasama Pelatihan dengan Berbagai Instansi dan Lembaga;
Adanya kebutuhan peningkatan kapasitas SDM peternakan dari instansi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, swasta, maupun lembaga lainnya di luar Kementerian Pertanian menjadi peluang untuk memperluas jejaring kerjasama pelatihan. Hal ini dapat meningkatkan pemanfaatan sarana pelatihan serta memperkuat posisi BBPP Batu sebagai pusat pelatihan peternakan nasional.
4. Perkembangan Teknologi Informasi Mendukung Inovasi Metode Pelatihan;
Perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi BBPP Batu untuk mengembangkan pola pelatihan yang lebih fleksibel, efektif, dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi digital seperti pembelajaran daring, media pembelajaran interaktif, dan sistem informasi pelatihan. Hal ini memungkinkan jangkauan peserta pelatihan menjadi lebih luas.

5. Peluang Pengembangan Model Pelatihan Berbasis Teknologi Modern; Perkembangan teknologi di bidang pertanian dan peternakan memberikan peluang bagi BBPP Batu untuk mengembangkan model pelatihan berbasis teknologi modern seperti *smart farming*, mekanisasi peternakan, dan pemanfaatan teknologi digital. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pelatihan sekaligus memperkuat daya saing lembaga pelatihan di tingkat nasional.

b. Tantangan (*Threat*)

1. Dampak Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan;

Perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan menjadi tantangan dalam mendukung keberlanjutan pelatihan peternakan dan ketahanan pangan. Penurunan debit air yang bersumber dari mata air Coban Petak akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat sekitar, serta potensi bencana alam seperti longsor dan banjir akibat berkurangnya lahan terbuka hijau menjadi ancaman nyata bagi operasional BBPP Batu.

2. Risiko Gangguan Kesehatan Ternak dan Produktivitas Peternakan

Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dapat mempengaruhi produktivitas ternak serta keberlangsungan kegiatan praktik pelatihan peternakan. Kondisi ini berpotensi mengganggu proses pembelajaran praktik dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi lembaga;

3. Persaingan Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi;

Semakin banyak lembaga atau instansi di luar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelatihan Pertanian yang menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi di bidang peternakan menjadi tantangan bagi BBPP Batu untuk mempertahankan daya saing, kualitas layanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap program pelatihan yang diselenggarakan.

4. Tuntutan Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi dan SDM;

Perkembangan teknologi yang sangat dinamis menuntut pola pelatihan, kompetensi widyaiswara, dan tenaga pelatihan untuk terus beradaptasi. Jika tidak diikuti dengan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan, maka hal ini dapat mempengaruhi kualitas layanan pelatihan dan relevansi materi pelatihan dengan kebutuhan pengguna.

5. Tantangan Sosial dan Pengelolaan Lingkungan Peternakan;
 Minat generasi muda yang masih rendah terhadap sektor peternakan menjadi tantangan dalam regenerasi pelaku usaha peternakan. Selain itu, kegiatan pemeliharaan ternak berpotensi menimbulkan polusi udara dan air serta belum tersedianya dokumen AMDAL menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan BBPP Batu.

1.2.3. Analisa SWOT

1. Internal Factors Analysis Summary (IFAS)

Tabel 1. Internal Factors Analysis Summary (IFAS)

Faktor Strategis	Tingkat Signifikan	Bobot	Rating	Skor
Strength/Kekuatan				
1. Dukungan Regulasi dan Wilayah Kerja Nasional	2,5	0,09	4	0,37
2. Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Profesional	3	0,11	4	0,44
3. Sarana Prasarana dan Lingkungan Pelatihan yang Mendukung	3	0,11	4	0,44
4. Sistem Mutu dan Program Pelatihan yang Terstandar	3	0,11	4	0,44
5. Jejaring Kerjasama dan Layanan Sertifikasi Kompetensi	3	0,11	4	0,44
Total				2,15
Weakness /Kelemahan				
1. Keterbatasan Lahan untuk Pengembangan Sarana Praktik	2,5	0,09	2	0,19
2. Sarana dan Prasarana Pelatihan yang Belum Sepenuhnya Modern	2,5	0,09	2	0,19
3. Pengembangan Kompetensi SDM yang Belum Merata	2,5	0,09	2	0,19
4. Keterbatasan Kompetensi SDM dalam Penguasaan Teknologi dan Bahasa Asing	2,5	0,09	1	0,09
5. Kompetensi Teknis dan Jejaring Kerjasama yang Belum Optimal	2,5	0,09	1	0,09
Total	27	1,00		0,74

$$\begin{aligned} \text{Nilai Internal (X)} &= X = S-W; \\ X &= 2,15 - 0,74; \\ X &= 1,41 \end{aligned}$$

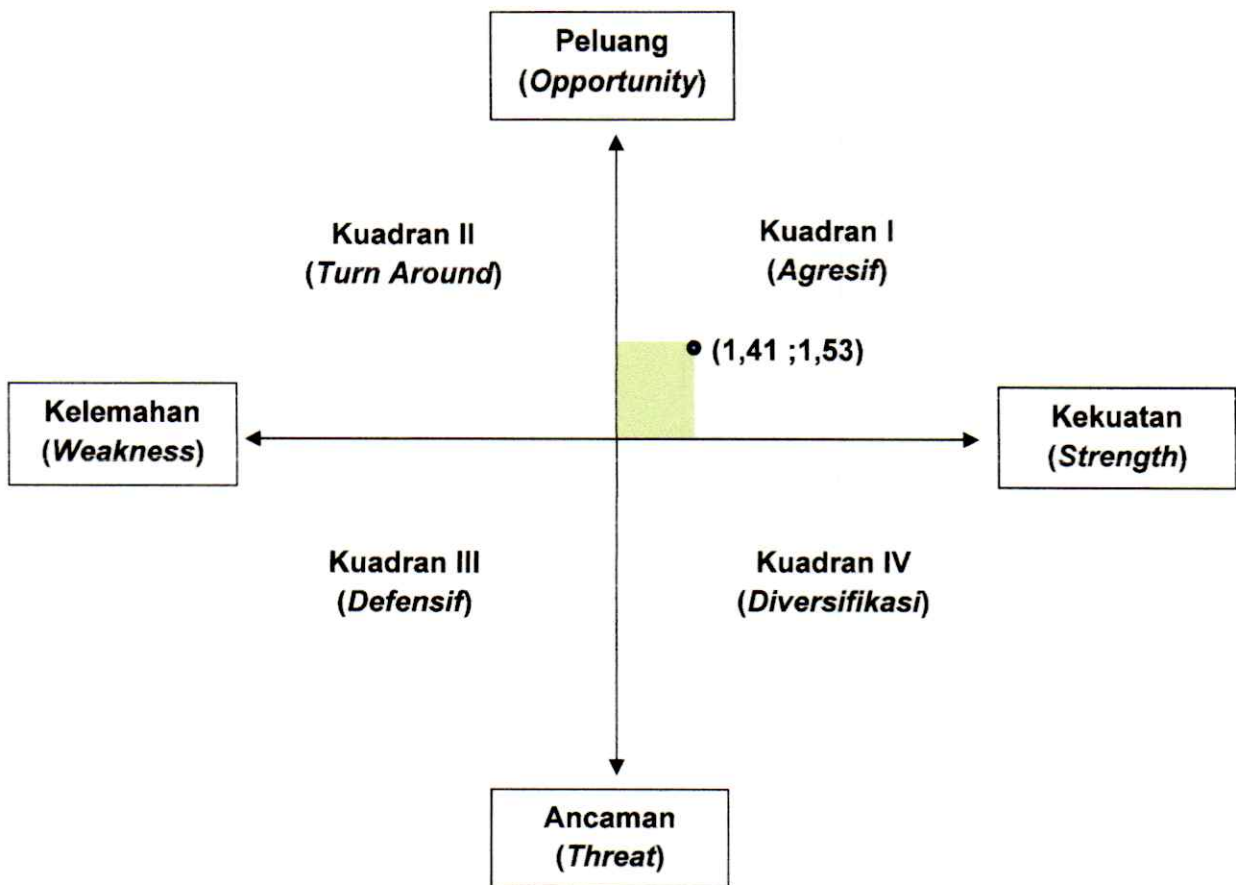
2. *External Factors Analysis Summary (EFAS)*

Tabel 2. *External Factors Analysis Summary (EFAS)*

Faktor Strategis	Tingkat Signifikan	Bobot	Rating	Skor
Opportunity/Peluang				
1. Meningkatnya Kebutuhan SDM Pertanian yang Kompeten	5	0,13	4	0,53
2. Meningkatnya Kebutuhan SDM Pertanian yang Tersertifikasi	3	0,08	4	0,32
3. Peluang Kerjasama Pelatihan dengan Berbagai Instansi dan Lembaga	3	0,08	4	0,32
4. Perkembangan Teknologi Informasi Mendukung Inovasi Metode Pelatihan	5	0,13	4	0,53
5. Peluang Pengembangan Model Pelatihan Berbasis Teknologi Modern	3	0,08	4	0,32
Total				2,00
Threat /Ancaman				
1. Dampak Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan	3	0,08	1	0,08
2. Risiko Gangguan Kesehatan Ternak dan Produktivitas Peternakan	3	0,08	1	0,08
3. Persaingan Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi	5	0,13	1	0,13
4. Tuntutan Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi dan SDM	4	0,08	1	0,08
5. Tantangan Sosial dan Pengelolaan Lingkungan Peternakan	4	0,11	1	0,11
Total	38	0,97		0,47

$$\begin{aligned} \text{Nilai Eksternal (Y)} &= Y = O-T ; \\ Y &= 2,00 - 0,47; \\ Y &= 1,53 \end{aligned}$$

Kuadran Strategis



Gambar 3. Kuadran Strategis SWOT BBPP Batu

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, posisi BBPP Batu berada pada Kuadran I. Posisi ini menunjukkan bahwa secara internal BBPP Batu memiliki kekuatan yang besar, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, sistem mutu, maupun sarana pendukung pelatihan. Di sisi lain, secara eksternal tersedia peluang yang sangat baik, terutama meningkatnya kebutuhan sumber daya manusia pertanian yang kompeten dan tersertifikasi serta perkembangan teknologi yang mendukung inovasi metode pelatihan. Hasil analisis SWOT yang menempatkan BBPP Batu pada Kuadran I, strategi yang tepat untuk diterapkan adalah strategi SO (*Strength-Opportunity*) atau strategi agresif. Strategi ini menekankan pada pemanfaatan seluruh kekuatan internal organisasi untuk menangkap dan mengoptimalkan peluang eksternal yang tersedia. Kombinasi antara kekuatan internal yang dominan dan peluang eksternal yang terbuka luas tersebut menggambarkan bahwa kondisi organisasi

sangat kondusif untuk melakukan pengembangan dan ekspansi program pelatihan. Dengan demikian, BBPP Batu berada pada fase organisasi berkembang (*growth institution*), sehingga strategi yang tepat adalah memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk menangkap dan mengoptimalkan peluang dalam rangka memperkuat peran sebagai pusat pelatihan peternakan yang unggul dan berdaya saing,

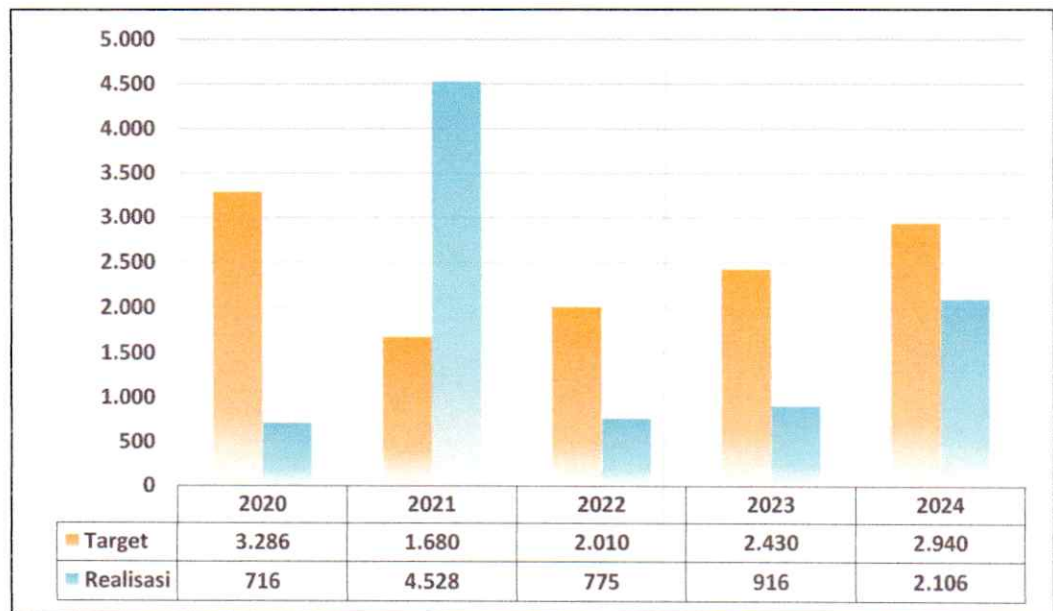
Dalam konteks tersebut, langkah yang perlu dilakukan adalah:

- Mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi nasional dengan memanfaatkan dukungan regulasi, sumber daya manusia yang kompeten, serta sistem sertifikasi yang telah dimiliki. Upaya ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pertanian yang kompeten dan tersertifikasi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.
- BBPP Batu perlu memperkuat posisinya sebagai pusat pelatihan peternakan nasional dengan mengoptimalkan mandat wilayah kerja nasional serta sarana dan prasarana pelatihan yang tersedia. Hal ini dapat diwujudkan melalui perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas pelatihan unggulan di bidang persusuan dan teknologi hasil ternak.
- Pengembangan pelatihan berbasis teknologi digital juga menjadi strategi penting. Dengan dukungan sistem manajemen mutu dan tenaga profesional yang dimiliki, BBPP Batu dapat mengembangkan metode pembelajaran berbasis teknologi informasi, seperti *e-learning* dan penerapan konsep *smart farming*, sehingga pelatihan menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
- Perluasan kerja sama pelatihan dan sertifikasi harus terus ditingkatkan dengan memanfaatkan jejaring yang telah terbangun serta keberadaan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Kerja sama dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan akan memperluas akses pelatihan sekaligus meningkatkan kontribusi balai dalam pengembangan SDM peternakan.
- Peningkatan daya saing lembaga pelatihan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan status akreditasi program pelatihan dan sertifikasi ISO yang telah dimiliki. Melalui penguatan kualitas layanan, tata kelola yang baik, dan standar mutu yang konsisten, BBPP Batu dapat mempertahankan bahkan meningkatkan posisinya sebagai lembaga pelatihan peternakan yang unggul dan terpercaya

1.3. Capaian Kinerja BBPP Batu 2020 - 2024

1.3.1. Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan

Selama periode Tahun 2020-2024, BBPP Batu telah melaksanakan pelatihan yang ditujukan bagi aparatur (ASN) dan juga non aparatur (petani, pemuda tani, dan pelaku usaha) di bidang pertanian. Adapun target dan realisasi pelatihan yang telah di laksanakan di BBPP Batu dapat di lihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Capaian Realisasi Peserta Pelatihan Tahun 2020 – 2024

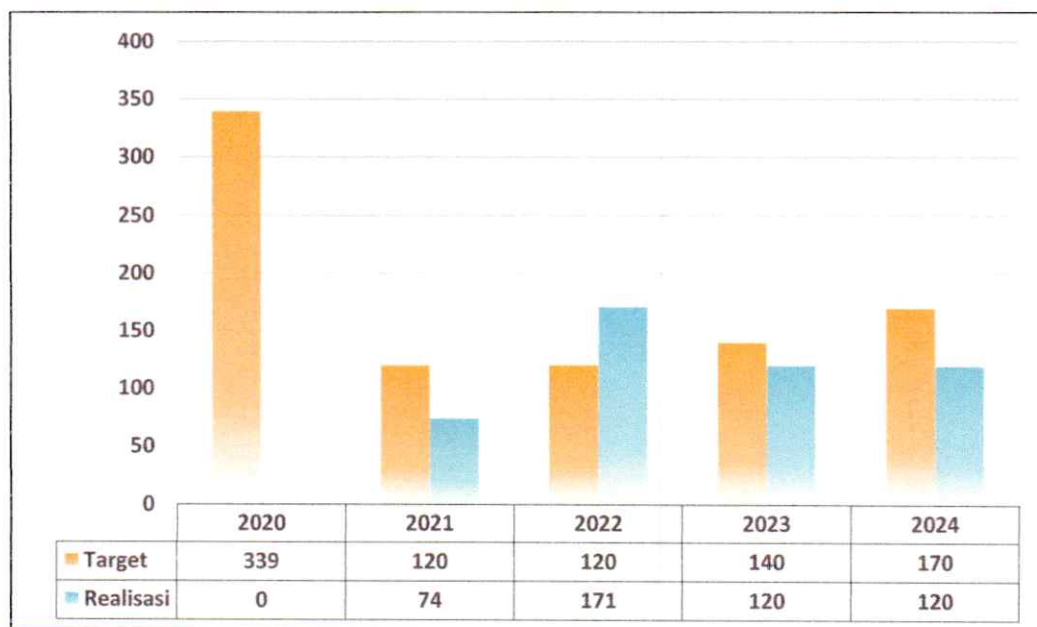
Berdasarkan Renstra BBPP Batu Tahun 2020 – 2024, target peserta pelatihan bidang pertanian dan perikanan sebanyak 12.346 orang. Adapun realisasi peserta pelatihan di BBPP Batu Tahun 2020 – 2024 sebanyak 9.041 orang atau setara dengan 73,23 %. Kondisi ini di karenakan adanya revisi anggaran akibat dampak pandemi covid 19 di tahun 2020.

1.3.2. Sertifikasi Profesi dan SDM

Guna menjamin kualitas SDM sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sertifikasi profesi menjadi instrumen yang penting. Capaian sertifikasi profesi menunjukkan pengakuan formal atas keahlian yang dimiliki oleh para praktisi pertanian.

Berdasarkan Renstra BBPP Batu Tahun 2020 – 2024, target peserta yang mengikuti sertifikasi profesi bidang pertanian sebanyak 889 orang. Adapun capaian realisasi peserta sertifikasi profesi bidang pertanian di BBPP Batu tahun 2020 – 2024 sebanyak 485 orang atau setara dengan 54,56 %. Kondisi ini di karenakan adanya pengurangan atau penurunan pagu anggaran. Adapun target

dan realisasi peserta sertifikasi profesi Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Gambar 5.



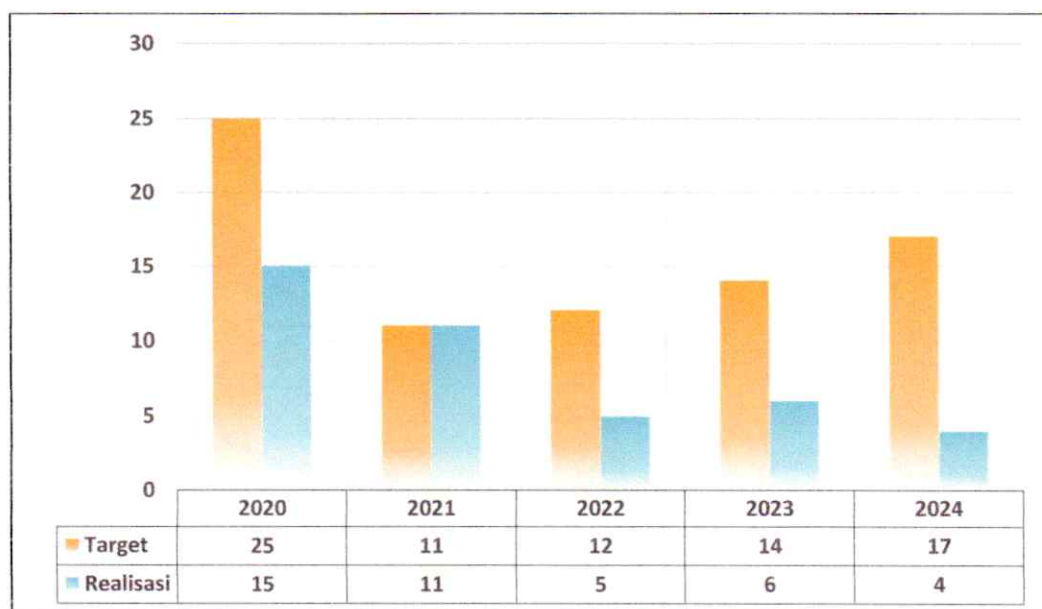
Gambar 5. Capaian Realisasi Peserta Sertifikasi Profesi Tahun 2020 - 2024

1.3.3. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (P4S)

Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya yang selanjutnya disingkat P4S adalah kelembagaan pelatihan dengan metode permagangan pertanian dan perdesaan yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh pelaku utama dan pelaku usaha secara swadaya baik perorangan maupun kelompok.

Hingga akhir tahun 2024, jumlah P4S binaan BBPP Batu berjumlah 57 P4S. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan periode tahun 2020 yang berjumlah 77 P4S. Kondisi ini didasarkan atas Surat Keputusan Kepala BPPSDMP tentang Wilayah Kerja UPT Pelatihan Pertanian, dimana untuk wilayah pembinaan P4S BBPP Batu yang semula 5 Provinsi (Bali, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat) menjadi 3 Provinsi (Bali, Papua Barat dan Papua Barat Daya).

Kegiatan fasilitasi dan Pembinaan Lembaga bagi P4S selama periode Tahun 2020 – 2024 berupa kegiatan penumbuhan dan penguatan P4S. Dimana bentuk kegiatan yang di lakukan berupa penumbuhan, klasifikasi P4S, pembinaan dan Penguatan P4S dalam bentuk fasilitasi bantuan sarana pendukung pembelajaran. Adapun target dan realisasi kegiatan fasilitasi dan pembinaan lembaga (P4S) Tahun 2020 – 2024 dapat di lihat pada Gambar 6.



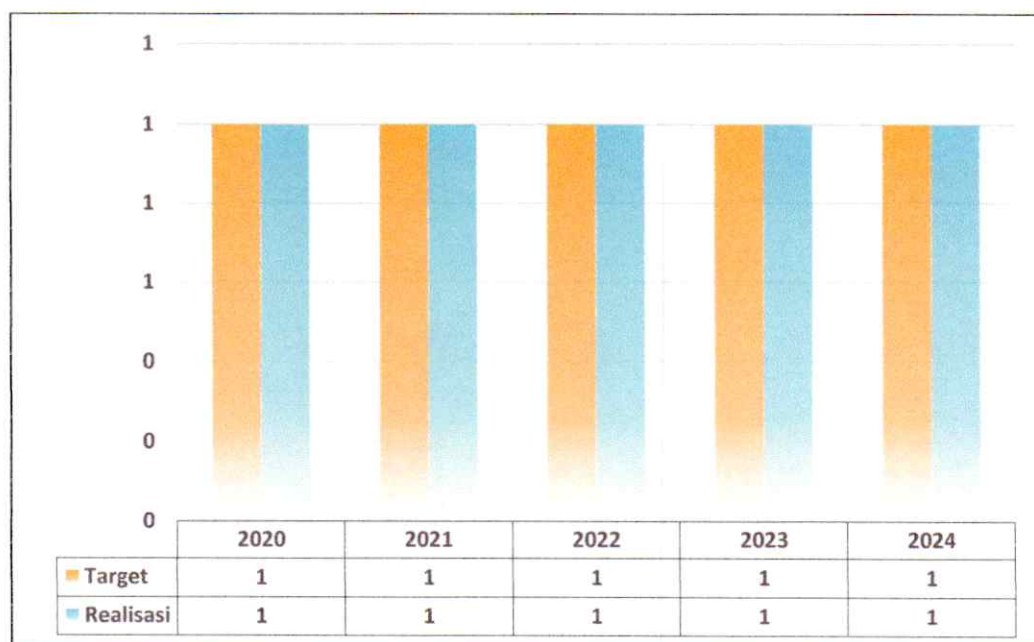
Gambar 6. Capaian Realisasi Penumbuhan dan Penguatan P4S Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan Renstra BBPP Batu Tahun 2020 – 2024, target Penumbuhan dan Penguatan P4S sebanyak 79 lembaga. Sampai dengan periode 2024, capaian realisasi sebanyak 41 lembaga P4S atau setara dengan 51,90 %. Kondisi ini dikarenakan alokasi anggaran APBN untuk mencapai target tersebut tidak ada penambahan, sehingga penguatan kepada P4S dalam bentuk fasilitasi bantuan sarana prasarana hanya sesuai dengan target dan anggaran yang tersedia di DIPA.

1.3.4. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pemenuhan sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup merupakan pengembangan sarana pelatihan dengan tujuan agar sarana yang dimiliki memenuhi kebutuhan saat ini dan di masa mendatang serta memenuhi standar yang berlaku.

Kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana ini sangat vital dan strategis dalam rangka mendukung penguatan kelembagaan dan peningkatan pelatihan di BBPP Batu. Sumber dana untuk pemenuhan sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup di BBPP Batu tidak hanya mengandalkan dari Rupiah Murni tetapi juga mengoptimalkan sumber dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Target dan realisasi pengadaan sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup BBPP Batu pada Tahun 2020 – 2024 dapat di lihat pada Gambar 7.

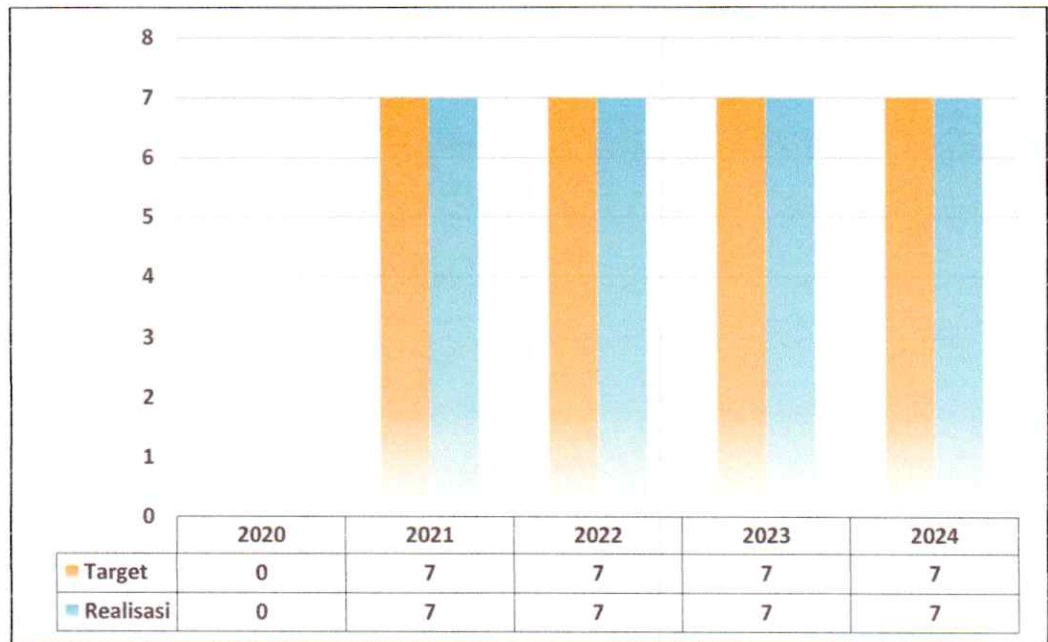


Gambar 7. Capaian Realisasi Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan Renstra BBPP Batu Tahun 2020 – 2024, target Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebanyak 5 unit. Capaian realisasi sampai periode tahun 2024 sebanyak 5 unit atau sebesar 100 %. Pencapaian target tersebut, karena BBPP Batu juga mengoptimalkan potensi – potensi sumber pendanaan PNPB selain dukungan dari APBN.

1.3.5. Koordinasi (Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan)

Kegiatan Koordinasi, sosialisasi, bimtek, monev dan pelaporan merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelatihan pertanian. Kegiatan ini meliputi penyusunan anggaran dan program rencana kerja, Identifikasi Kebutuhan Pelatihan (IKP), Monitoring Pelatihan, Evaluasi pasca pelatihan, Kerjasama, Keuangan, Organisasi dan Kepegawaian, administrasi kegiatan, Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Mutu, koordinasi kegiatan ke stakeholder bidang pertanian dan atau yang berkaitan lainnya serta koordinasi kegiatan dalam rangka pendampingan dan pengawalan pelaksanaan program utama Kementerian Pertanian. Target dan realisasi kegiatan Koordinasi (koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan) periode Tahun 2020 – 2024 dapat di lihat pada Gambar 8.



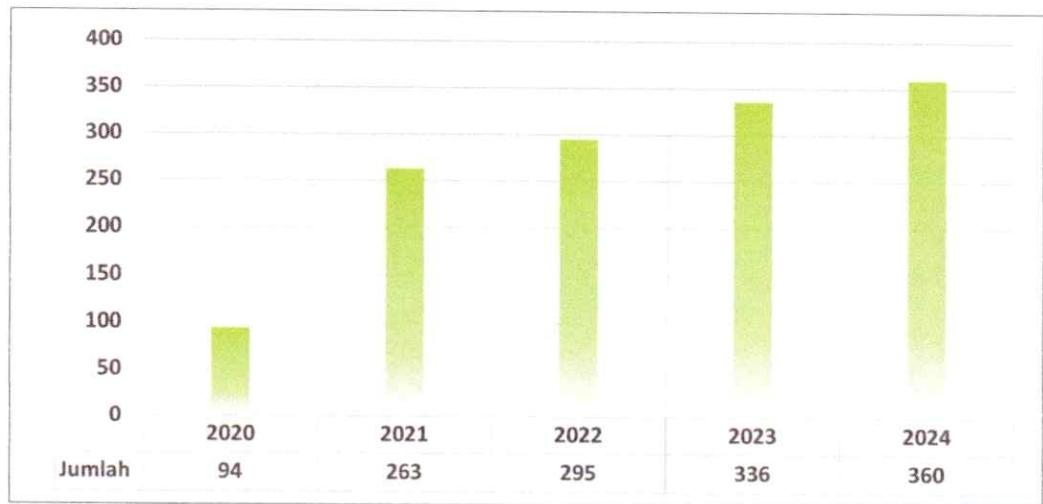
Gambar 8. Capaian Realisasi Koordinasi (koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan) Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan target Renstra tahun 2020 – 2024, target kinerja kegiatan Koordinasi (koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan) periode tahun 2020 – 2024 sebanyak 28 kegiatan. Hingga tahun 2024 realisasi kegiatan sebanyak 27 atau tercapai 100 %. Pada periode tahun 2020, untuk target koordinasi berjumlah 0 kegiatan, di karenakan pada periode tahun tersebut, untuk KRO koordinasi belum ada pada DIPA BBPP Batu, namun pada periode tahun 2020 tersebut kegiatan tersebut di akomodir pada KRO Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan target 1 layanan dengan realisasi 1 layanan.

1.3.6. Kerjasama Pelatihan PNBP

Dengan adanya efisiensi anggaran, setiap UPT Pelatihan Puslatan di himbau untuk tidak hanya mengandalkan anggaran APBN dalam menyelenggarakan pelatihan, setiap UPT di harapkan dapat meningkatkan kerjasama pelatihan PNBP dengan Dinas/Instansi/Lembaga maupun pihak swasta.

Selama periode 2020-2024, capaian kerjasama pelatihan PNBP di BBPP Batu menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukn bahwa tingkat kepercayaan stake holder terhadap BBPP Batu sebagai mitra dalam meningkatkan kompetensi bagi aparatur dan non aparatur semakin meningkat. Capaian Kerjasama Pelatihan PNBP Tahun 2020 – 2024 dapat di lihat pada Gambar 9.



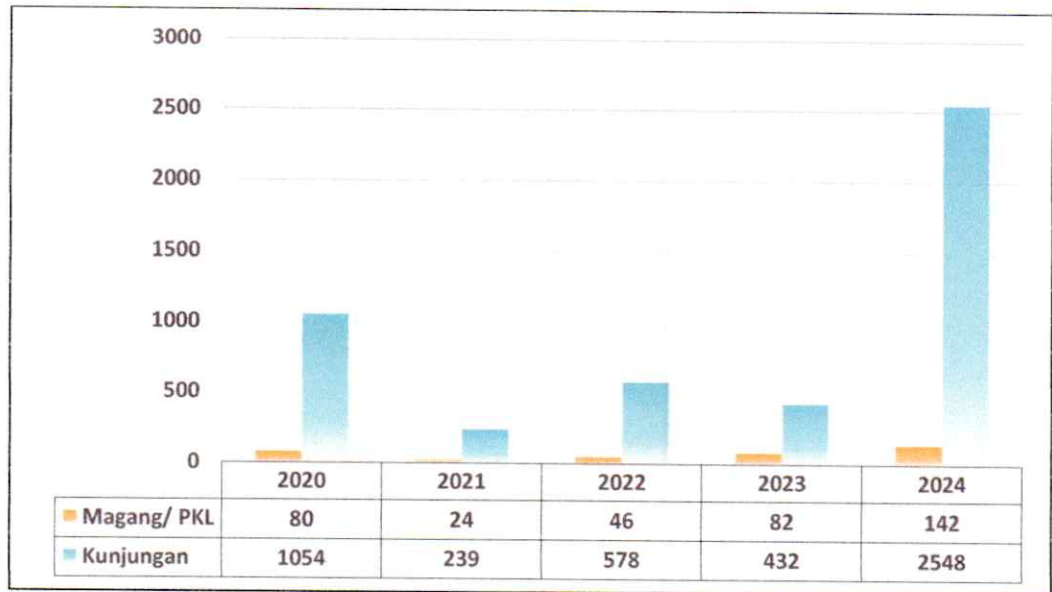
Gambar 9. Capaian Realisasi Peserta Pelatihan Kerjasama PNBP Tahun 2020 - 2024

1.3.7. Kunjungan dan Magang/ Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Dalam upaya memperkenalkan dunia peternakan kepada generasi muda, BBPP Batu juga memberikan kesempatan bagi siswa dan mahasiswa dari sekolah dan perguruan tinggi untuk melaksanakan kunjungan dan PKL (Praktek Kerja Lapang) di BBPP Batu.

Selama Tahun 2020-2024 telah terjadi peningkatan jumlah orang yang berkunjung dan magang/PKL di BBPP Batu. Jumlah siswa dan mahasiswa yang PKL dan magang meningkat dari 80 orang pada Tahun 2020 menjadi 142 orang pada Tahun 2024. Sedangkan jumlah kunjungan ke BBPP Batu juga mengalami peningkatan dari 1.054 orang pada Tahun 2020 menjadi 2.548 orang pada Tahun 2024.

Pada Tahun 2021 – 2023 jumlah kunjungan ke Balai mengalami penurunan di karenakan adanya pembatasan kunjungan ke instalasi kandang ternak di Balai sebagai akibat adanya Penyakit Hewan Menular Strategis yaitu PMK (Penyakit Mulut dan Kuku). Jumlah orang yang berkunjung dan magang/ PKL di Balai selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 10.



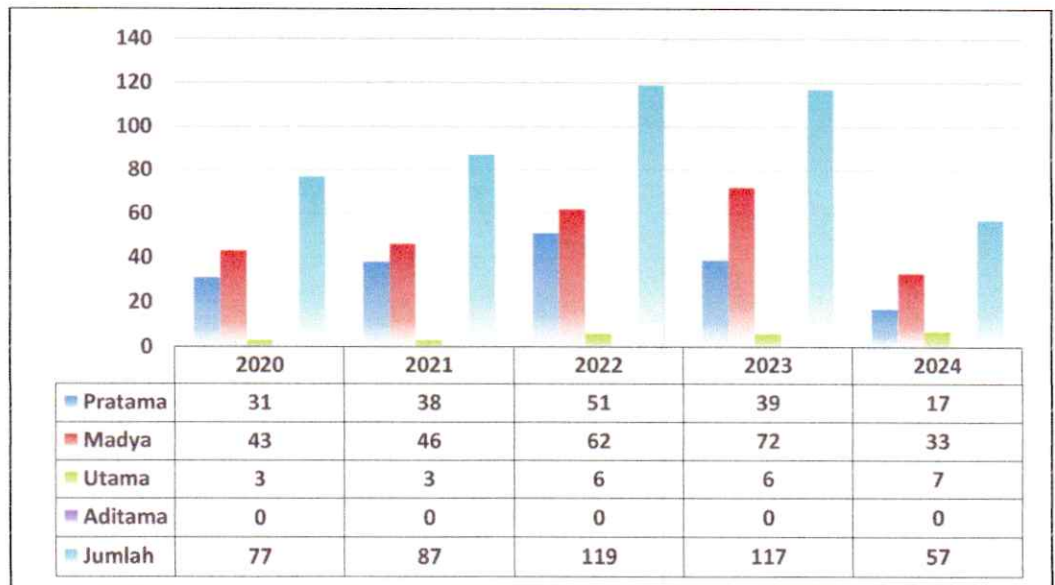
Gambar 10. Capaian Realisasi Jumlah Peserta Kunjungan dan Magang/PKL BBPP Batu Tahun 2020 - 2024

1.3.8. Pembinaan kepada Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)

BBPP Batu juga memiliki tugas dalam melaksanakan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian atau peternakan swadaya P4S.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 181/Kpts/OT.020/I/11/2023 tentang Pembagian Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan di Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Wilayah pembinaan P4S BBPP Batu meliputi 3 Provinsi yaitu Bali, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Wilayah kerja binaan P4S ini berbeda dari tahun sebelumnya yang meliputi 5 propinsi yaitu Bali, NTB, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.

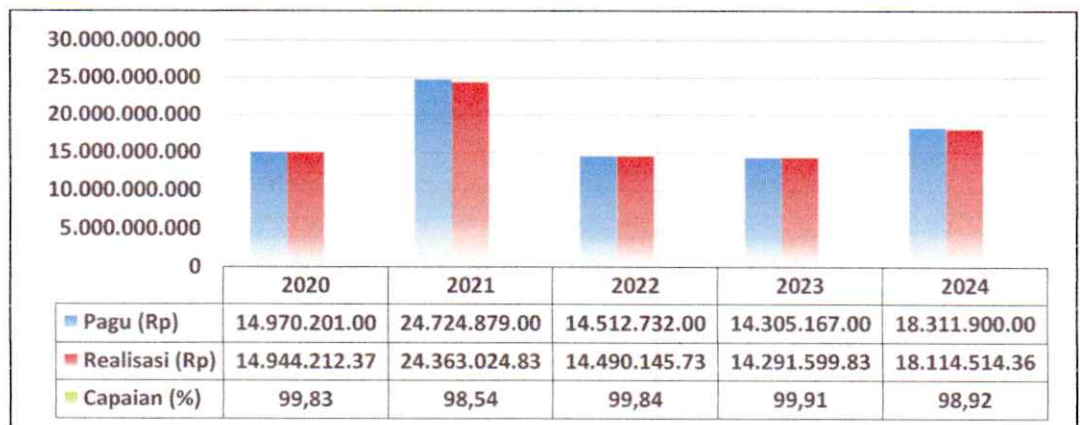
Perubahan SK pada wilayah kerja binaan P4S mengakibatkan adanya pergeseran jumlah binaan P4S pada Tahun 2024. Terdapat 3 provinsi yang tidak lagi menjadi wilayah binaan BBPP Batu yaitu Propinsi NTB, Maluku dan Maluku Utara. Jumlah P4S binaan BBPP Batu Tahun 2020 – 2024 dapat di lihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Jumlah P4S Binaan BBPP Batu berdasarkan Kelas Klasifikasi Tahun 2020 - 2024

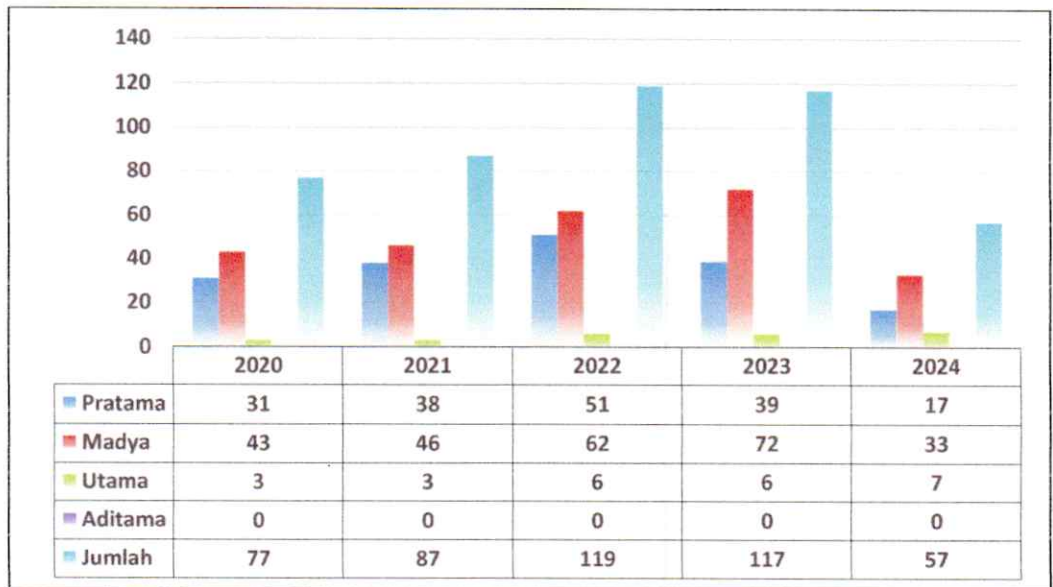
1.3.9. Pembiayaan

BBPP Batu dalam melaksanakan tugas dan fungsi memperoleh dukungan anggaran yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) BBPP Batu Tahun 2020 – 2024. Pagu dan Realisasi Anggaran BBPP Batu Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA BBPP Batu Tahun 2020 - 2024

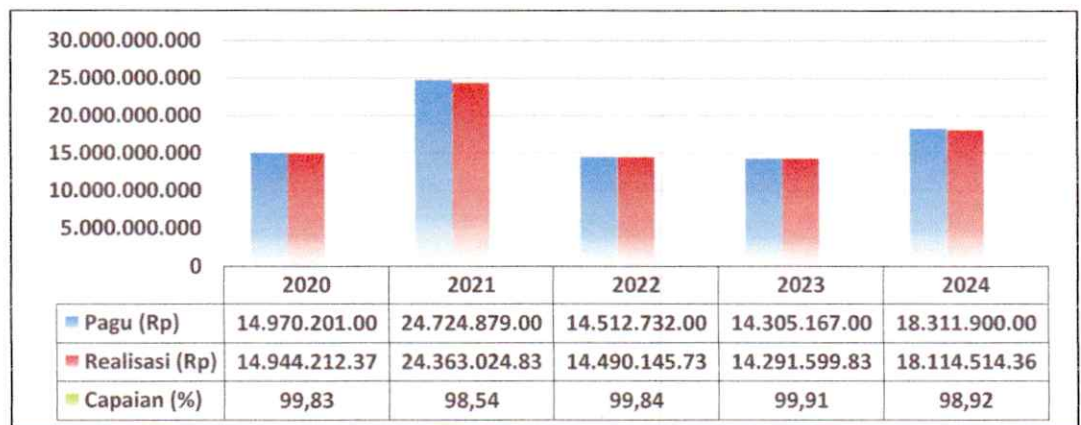
Pagu anggaran BBPP Batu selain bersumber dari Rupiah Murni, juga bersumber dari PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Selama Tahun 2020-2024 trend penerimaan PNBPN BBPP Batu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penerimaan fungsional BBPP Batu bersumber dari beberapa sumber penerimaan antara lain: 1). Pendapatan penjualan hasil pertanian, 2). Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi, 3). Pendapatan pengujian, Sertifikasi kalibrasi dan standarisasi lainnya,



Gambar 11. Jumlah P4S Binaan BBPP Batu berdasarkan Kelas Klasifikasi Tahun 2020 - 2024

1.3.9. Pembiayaan

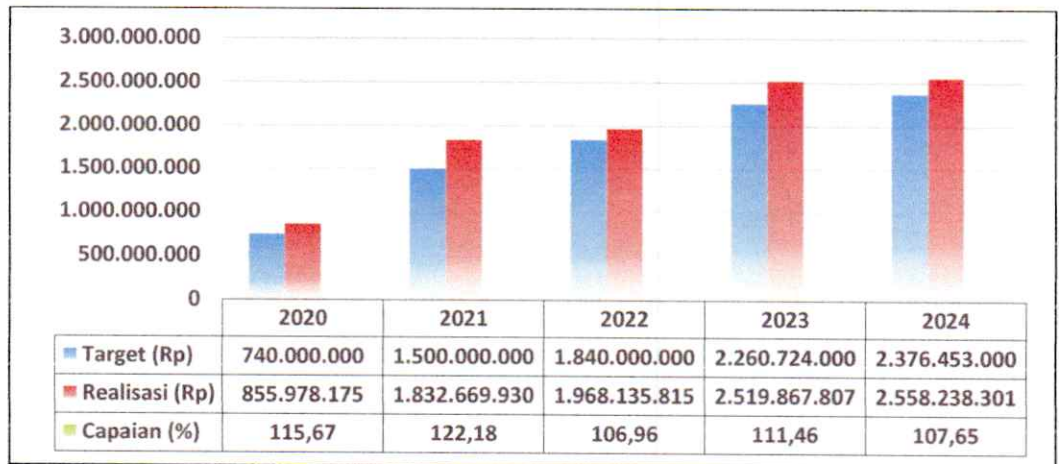
BBPP Batu dalam melaksanakan tugas dan fungsi memperoleh dukungan anggaran yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) BBPP Batu Tahun 2020 – 2024. Pagu dan Realisasi Anggaran BBPP Batu Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA BBPP Batu Tahun 2020 - 2024

Pagu anggaran BBPP Batu selain bersumber dari Rupiah Murni, juga bersumber dari PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Selama Tahun 2020-2024 trend penerimaan PNBPN BBPP Batu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penerimaan fungsional BBPP Batu bersumber dari beberapa sumber penerimaan antara lain: 1). Pendapatan penjualan hasil pertanian, 2). Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tuisi, 3). Pendapatan pengujian, Sertifikasi kalibrasi dan standarisasi lainnya,

4). Pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan dan 5). Pendapatan Pengembangan SDM Lainnya. Adapun Target dan Realisasi Penerimaan PNBP BBPP Batu Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Target dan Realisasi Penerimaan PNBP BBPP Batu Tahun 2020 - 2024

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Pertanian

2.1.1. Visi Kementerian Pertanian

Berdasarkan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029, telah ditetapkan Visi Presiden Tahun 2025 – 2029 adalah “**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**”. Visi ini bermakna bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra – putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Sebagai salah satu Kementerian Negara, Kementerian Pertanian turut berkontribusi dalam mewujudkan Visi Presiden. Visi Kementerian Pertanian merepresentasikan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode 2029 yang selaras dengan Visi Presiden. Adapun Visi Kementerian Pertanian 2025–2029 adalah “**Pertanian Maju Berkelanjutan Serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”

Visi Kementerian Pertanian 2025 – 2029 secara umum memiliki arti bahwa pembangunan pertanian di lanjutkan dengan serangkaian upaya strategis dalam mewujudkan pertanian yang maju sesuai perkembangan zaman. Selain itu, pembangunan sektor pertanian harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara rinci, Visi Kementerian Pertanian tahun 2025 – 2029 memiliki 4 (empat) kata kunci, antara lain : pertanian, pertanian maju, pertanian berkelanjutan dan pertanian yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia dengan pendetailan sebagai berikut:

a. **Pertanian**

Berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 2 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, **Pertanian** bermakna kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

b. **Pertanian Maju**

Pertanian yang maju bermakna bahwa Pertanian Indonesia yang akan mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik pertanian

terkini pada seluruh rantai proses utama pertanian, meliputi Penyiapan Prasarana dan Sarana Pertanian, Budidaya Pertanian, Pasca Panen komoditas Pertanian, Pengolahan komoditas Pertanian, serta Pemasaran komoditas pertanian.

c. Pertanian Berkelanjutan

Pertanian berkelanjutan berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 1 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sehingga, dalam praktik Pertanian berkelanjutan, sumber daya pertanian yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya. Selain itu, pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular pada pembangunan nasional, dimana peran sektor pertanian adalah melalui penerapan pertanian berkelanjutan.

d. Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia

Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia bermakna bahwa Pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, dimana melalui pembangunan pertanian tersebut, terdapat beberapa manfaat yang diterima masyarakat sebagai berikut:

- 1) Komoditas pertanian yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian.
- 2) Pertanian bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
- 3) Komoditas pertanian dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk rakyat.
- 4) Kesehatan rakyat (*one health*) dapat terwujud, khususnya dari pencegahan dan penanganan penyakit yang ditularkan melalui hewan

2.1.2. Misi Kementerian Pertanian

Dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025 – 2029 serta memastikan kontribusi dalam pelaksanaan Asta Cita Presiden, Kementerian Pertanian menetapkan misi Kementerian Pertanian tahun 2025 – 2029 meliputi :

a. Meningkatkan kesejahteraan petani.

Kesejahteraan Petani merupakan kondisi di mana petani dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Meningkatkan kesejahteraan petani dilakukan melalui upaya strategis agar petani mendapatkan harga yang layak, melindungi usaha petani, mendorong kemandirian petani serta memberikan bantuan pemerintah dalam rantai nilai pertanian, meliputi Penyiapan Prasarana dan Sarana Pertanian, Budidaya Pertanian, Pasca Panen komoditas Pertanian, Pengolahan komoditas Pertanian, serta Pemasaran komoditas pertanian.

b. Mendorong kemandirian pangan asal pertanian.

Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Hal ini berarti bermakna bahwa kemandirian pangan dapat diwujudkan melalui swasembada pangan pada beberapa komoditas pertanian strategis yang menjadi prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maupun prioritas Kementerian Pertanian.

c. Meningkatkan nilai manfaat produk pertanian bagi rakyat Indonesia.

Produk pertanian memberikan nilai manfaat bagi rakyat Indonesia, yaitu:

- 1) Manfaat dalam memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian;
- 2) Manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani;
- 3) Manfaat sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT)

d. Mencegah dan menangani penularan penyakit hewan kepada manusia.

Misi 4 menekankan pada pencegahan dan penanganan penularan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) kepada manusia, sehingga berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan manusia, bahkan beberapa dapat menyebabkan kematian. Penyakit tersebut diantaranya adalah monkeypox (Mpox), Rabies, Anthrax, dan lain sebagainya. Penerapan sistem kesehatan hewan nasional secara komprehensif diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan, dapat meminimalisir dampak dari penularan penyakit dari hewan dan/atau produk hewan ini.

e. Meningkatkan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Misi ini merupakan kontribusi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi Birokrasi (RB) Kementan dibagi atas 2 (dua), yaitu RB General dan RB Tematik. Fokus RBN yang diterjemahkan menjadi Reformasi Birokrasi (RB) level mikro (K/L) adalah RB Kementan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat

2.1.3. Tujuan Kementerian Pertanian

Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Pertanian tahun 2025 – 2029 dirumuskan Tujuan Kementerian Pertanian 2025 – 2029. Tujuan merupakan visi yang di persempit, menggambarkan kondisi yang ingin di capai dalam mewujudkan visi serta melaksanakan misi Kementerian Pertanian. Berikut penjabaran tujuan Kementerian Pertanian 2025 – 2029 :

1. Tujuan 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Tujuan ini merupakan peran Kementerian Pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan kesejahteraan petani di harapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani dari tahun ke tahun sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara bertahap. Tujuan ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan yaitu Indeks Kesejahteraan Petani.

2. Tujuan 2 : Terwujudnya Kemandirian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Prioritas

Terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas memiliki 4 (empat) indikator tujuan, yaitu : indeks swasembada pangan prioritas, indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan, presentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian dan Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian.

3. Tujuan 3 : Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian bagi Rakyat

Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat memiliki 3 (tiga) indikator tujuan yaitu : persentase peningkatan pemenuhan

produksi pertanian terhadap kebutuhan bahan baku bio energi, pertumbuhan PDB tanaman perkebunan dan pertumbuhan PDB tanaman hortikultura.

4. Tujuan 4 : Meningkatnya Kesehatan Masyarakat dari Akibat dan Dampak Penyakit Hewan serta Penyakit Bawaan Pangan

Meningkatnya kesehatan masyarakat dari akibat dan dampak penyakit hewan serta penyakit bawaan pangan diukur melalui indikator tujuan Indeks Kesehatan Masyarakat Veteriner.

5. Tujuan 5 : Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel dan Profesional

Reformasi Birokrasi Nasional adalah upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik yang telah berlangsung sejak tahun 2010. Tujuan terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel dan Profesional merupakan upaya reformasi birokrasi tingkat mikro (K/L) dalam membentuk birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik Kementerian Pertanian yang berdampak langsung kepada masyarakat. Tujuan 5, memiliki indikator tujuan yaitu persentase peningkatan nilai RB Kementerian Pertanian.

2.2. Visi, Misi, dan Tujuan BPPSDMP 2025 – 2029

2.2.1. Visi BPPSDMP

Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) merepresentasikan kondisi yang ingin di wujudkan pada akhir periode 2029. Penyusunan visi BPPSDMP selaras dengan Visi Kementerian Pertanian 2025–2029. Rumusan ini menjadi arah strategis peran BPPSDMP dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan pertanian nasional melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Adapun Visi BPPSDMP tahun 2025 – 2029 adalah **“SDM Pertanian yang produktif, maju, mandiri dan sejahtera sebagai aset dalam mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan serta bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**

Secara umum, visi BPPSDMP tahun 2025 – 2029 memiliki 4 (empat) kata kunci yaitu SDM pertanian produktif, SDM pertanian maju, SDM pertanian mandiri dan SDM pertanian sejahtera. Keempat kata kunci tersebut menjelaskan *positioning* SDM pertanian sebagai aset untuk mewujudkan Visi Kementerian Pertanian dan Visi Nasional. Penjelasan dari 4 (empat) kata kunci dijabarkan sebagai berikut :

a. SDM Pertanian Produktif

SDM Pertanian Produktif bermakna SDM Pertanian yang mampu meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomi keluarga.

b. SDM Pertanian Maju

SDM Pertanian Maju bermakna SDM Pertanian yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penyediaan, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

c. SDM Pertanian Mandiri

SDM Pertanian Mandiri bermakna SDM Pertanian yang tidak bergantung pada siapapun dalam menjalankan usaha

d. SDM Pertanian Sejahtera

SDM Pertanian Sejahtera bermakna SDM yang dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya

Dalam mewujudkan visi diatas, diperlukan modal manusia yang unggul dan modal organisasi yang proporsional. Agar arah kebijakan, kapasitas SDM, dan organisasi sebagai unsur pembentuk institusi dapat berjalan efektif dan efisien, diperlukan penyelarasan dengan sistem nilai Badan PPSDMP, yaitu:

- **Inklusif**, memiliki makna setiap kebijakan dan program membuka ruang partisipasi bagi semua pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, serta masyarakat luas.
- **Profesional**, memiliki makna seluruh kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dilaksanakan dengan standar kompetensi tinggi, berbasis ilmu pengetahuan, akuntabel, dan berintegritas.
- **Modern**, memiliki makna pengelolaan SDM pertanian dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital, inovasi, dan pendekatan berbasis data agar adaptif terhadap tantangan masa depan

2.2.2. Misi BPPSDMP

Dalam mewujudkan Visi BPPSDMP tahun 2025–2029, dirumuskan misi yang menjadi arah pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP selama 5 (lima) tahun ke depan. Adapun misi BPPSDMP tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

a. **Misi 1: Regenerasi petani untuk memastikan ketersediaan dan kualitas SDM Pertanian di masa yang akan datang**

Regenerasi merupakan upaya pembaharuan dan peningkatan kuantitas generasi muda yang tertarik dan memiliki komitmen untuk terlibat dalam sektor pertanian nasional. Dengan kondisi sektor pertanian yang dianggap tidak menarik oleh para generasi muda, mengubah persepsi untuk mendorong ketertarikan generasi muda terhadap sektor pertanian merupakan jawaban atas kondisi petani nasional yang sudah menua. Tanpa adanya generasi muda, maka keberlangsungan sektor pertanian Nasional akan menghadapi masalah serius dimasa mendatang. Regenerasi tidak hanya penting untuk keberlanjutan, lebih jauh lagi, regenerasi merupakan salah satu jawaban yang tepat untuk mengejar perkembangan teknologi pertanian. Dengan penguasaan dan pengetahuan teknologi yang lebih mumpuni, adopsi teknologi pertanian maju oleh petani muda lebih mudah dilakukan.

b. **Misi 2: Meningkatkan produktivitas, kompetensi dan kemandirian SDM Pertanian**

Peningkatan produktivitas, kompetensi dan kemandirian SDM pertanian merupakan hal yang saling terkait. Dengan mengusung paradigma *human capital* dalam pengelolaan SDM Pertanian, maka perlu ada perubahan sudut pandang mengenai SDM Pertanian dari faktor produksi menjadi modal utama yang berpengaruh langsung terhadap pembangunan sektor pertanian. Investasi dibutuhkan untuk meningkatkan nilai SDM pertanian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Jenis investasi terhadap SDM pertanian meliputi pengembangan kompetensi dan peningkatan kemandirian petani.

Pengembangan kompetensi berarti pengembangan terhadap pengetahuan, kemampuan dan sikap SDM pertanian. Dengan kompetensi yang berkembang maka metode penyelenggaraan pertanian yang dilakukan dapat lebih efektif. Peningkatan produktivitas merupakan salah satu hasil peningkatan kompetensi dimana SDM pertanian yang kompeten diharapkan dapat menghasilkan proses yang lebih efisien, dengan kata lain menghasilkan *output* yang lebih besar dengan *input* minimal. Peningkatan kemandirian adalah peningkatan kemampuan petani dan tenaga kerja di sektor pertanian untuk secara mandiri mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan usahanya tanpa terlalu bergantung pada bantuan atau intervensi eksternal. Kemandirian mendorong petani dapat mengambil keputusan yang efektif, menghadapi tantangan dalam

penyelenggaraan pertanian serta berinovasi dalam menghadapi tantangan di lingkungan strategis sektor pertanian.

c. Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan PPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional

Misi ini merupakan bentuk kontribusi Badan PPSDMP terhadap implementasi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Badan PPSDMP menyadari bahwa implementasi RB tidak hanya menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, lebih luas lagi, melibatkan seluruh unit kerja. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Badan PPSDMP diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja dan kinerja secara bersamaan dan merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan Visi Badan PPSDMP 2025 – 2029

2.2.3. Tujuan BPPSDMP

Perumusan Tujuan BPPSDMP mengacu dan menerjemahkan pelaksanaan misi kedalam capaian yang terukur, sehingga tingkat ketercapaian tujuan mencerminkan pelaksanaan misi BPPSDMP secara efektif dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi BPPSDMP tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis dan keselarasan kebijakan nasional, tujuan BPPSDMP tahun 2025 – 2029 di rumuskan menjadi 3 (tiga) tujuan yaitu:

a. Tujuan 1: Meningkatnya petani muda/milenial yang menetap di desa

Tujuan ini diukur melalui indikator Persentase desa yang mengalami peningkatan jumlah petani muda/milenial terhadap total desa. Target indikator ini di tetapkan sebesar 22,03 persen pada tahun 2025 dan meningkat secara bertahap hingga 22,43 pada tahun 2029.

b. Tujuan 2: Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani

Tujuan ini di ukur melalui indikator Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas. Target pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas di tetapkan sebesar 1 persen per tahun selama 2025 – 2029.

c. Tujuan 3 : Terwujudnya tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional

Tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja tata kelola organisasi, meliputi:

- 1) Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan auditor, dengan target 88,5 persen pada tahun 2025 meningkat menjadi 89,5 pada tahun 2029;

- 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPSDMP dengan target 90,00 pada tahun 2025 meningkat menjadi 91,00 pada tahun 2029;
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan BPPSDMP dengan target 3,60 pada tahun 2025 meningkat menjadi 3,64 pada tahun 2029.

2.3. Sasaran Program BPPSDMP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 - 2029, Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Pendekatan perumusan sasaran program BPPSDMP mengikuti penerjemahan pohon kinerja Kementerian Pertanian 2025 – 2029.

Kontribusi BPPSDMP pada pertumbuhan usaha tani nasional diterjemahkan menjadi Sasaran Program **“Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani.”** Sasaran tersebut merepresentasikan peningkatan skala dan kapasitas pelaku usaha tani dalam mengelola sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun sumberdaya pendukung lainnya yang secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Peningkatan kelas kemampuan pelaku usaha tani dapat diartikan sebagai perubahan status usaha kelembagaan petani yang terverifikasi menunjukkan peningkatan kapasitas, kinerja dan tata kelola sebagai hasil langsung intervensi kegiatan lingkup BPPSDMP. Peningkatan kelas tersebut mencerminkan usaha tani yang memiliki pendapatan lebih baik serta posisi bisnis yang semakin strategis dalam rantai nilai pertanian. dalam konteks ini, sumber daya manusia pertanian menempati peran kunci sebagai pelaku usaha sekaligus aset utama dalam pengembangan inovasi dan bisnis pertanian, sehingga keberhasilan peningkatan kelas usaha tani sangat di tentukan oleh kualitas SDM yang unggul, berjiwa kewirusahaan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

2.4. Sasaran dan Indikator Kinerja BBPP Batu 2025 – 2029

Berdasarkan Sasaran Program BPPSDMP tahun 2025 – 2029, Sasaran Kegiatan BBPP Batu diterjemahkan menjadi 2 (Dua) Sasaran Kegiatan (SK) yaitu **SK 1. Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan teknis pertanian (sesudah pelatihan)** dan **SK 2. Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan.**

2.5. Manajemen Risiko BBPP Batu

Manajemen risiko merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, serta memantau potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.

Dalam konteks Renstra, manajemen risiko menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dapat berjalan efektif, adaptif, serta berkelanjutan di tengah dinamika perubahan lingkungan strategis sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Pertanian. Penerapan manajemen risiko dalam organisasi memiliki tujuan antara lain:

1. Mengantisipasi potensi kegagalan pencapaian sasaran strategis.
2. Meminimalkan dampak negatif yang dapat mengganggu kinerja organisasi.
3. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis risiko.
4. Memastikan keberlanjutan program pembangunan SDM pertanian.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, sasaran dan arah kebijakan, risiko BBPP Batu tahun 2025 – 2029 dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama sebagai berikut:

1. Risiko pelaksanaan layanan
 - a) Perubahan isi lingkungan strategis yang dinamis seperti anomali iklim dan ancaman penyakit hewan menular strategis (PHMS);
 - b) Belum optimalnya jejaring kerjasama pelatihan dan pendayagunaan sarana prasarana balai;
 - c) Banyaknya lembaga eksternal di luar UPT Pusat Pelatihan Pertanian yang menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi serupa;
 - d) Rendahnya minat generasi muda pada sektor peternakan.

2. Risiko operasional

- a) Kesenjangan kompetensi Widyaiswara dan tenaga Pelatihan dalam penguasaan teknologi seperti alat mesin pertanian (alsintan) modern;
- b) Keterbatasan kemampuan tenaga pelatihan dan Widyaiswara dalam penguasaan IT, AI dan bahasa asing;
- c) Lemahnya sistem tracer study purnawidya pasca pelatihan;

3. Risiko teknis lapangan

- a) Kesulitan jaringan internet di daerah saat pelaksanaan pelatihan secara online;
- b) CPCL yang di sampaikan oleh dinas tidak sesuai dengan tujuan pelatihan;
- c) Kurikulum pelatihan yang di susun, kadang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan;
- d) Pemeliharaan sarana pelatihan belum di lakukan secara berkala.

Secara rinci, Matriks Manajemen Risiko dapat dilihat dari Tabel 3

Tabel 3. Matriks Manajemen Risiko BBPP Batu

No	Risiko Strategis	Dampak Terhadap sasaran	Tingkat Risiko *)	Strategi Mitigasi
1	Perubahan isi lingkungan strategis yang dinamis seperti anomali iklim dan ancaman penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Penurunan produktivitas purnawidya	Tinggi	<ul style="list-style-type: none">• Pemutakhiran modul dan kurikulum pelatihan yang adaptif terhadap tantangan di lapangan• Evaluasi dan pendampingan pasca pelatihan
2	Belum optimalnya jejaring kerjasama pelatihan pelatihan dan pendayagunaan sarana prasarana balai	Menurunnya peluang kolaborasi strategis untuk pembiayaan dan pemanfaatan teknologi dengan mitra kerjasama	Tinggi	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan standar kualitas pelatihan dan standar layanan pelatihan• Memperkuat Jejaring kerjasama dengan pihak eksternal• Branding pelatihan melalui konten di media sosial balai

No	Risiko Strategis	Dampak Terhadap sasaran	Tingkat Risiko *)	Strategi Mitigasi
3	Banyaknya lembaga eksternal di luar UPT Pusat Pelatihan Pertanian yang menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi serupa	Menurunnya daya saing organisasi	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan akreditasi program pelatihan
4	Rendahnya minat generasi muda pada sektor peternakan	Rendahnya adopsi teknologi dan Penurunan produktivitas jangka panjang	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan kegiatan inkubator agribisnis • Meningkatkan minat generasi muda melalui program kunjungan belajar, magang, PKL, eduwisata. •
5	Kesenjangan kompetensi Widyaiswara dan tenaga Pelatihan dalam penguasaan teknologi seperti alat mesin pertanian (alsintan) modern	Peningkatan kapasitas SDM mendukung program swasembada pangan kurang maksimal	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan TOT alsintan bagi WI dan tenaga pelatihan bekerjasama dengan industri/Perguruan tinggi/Instansi
6	Keterbatasan kemampuan tenaga pelatihan dan Widyaiswara dalam penguasaan IT, AI dan bahasa asing	Transformasi digital pertanian menjadi terhambat sehingga materi pelatihan kurang tersampaikan dengan baik	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kompetensi bagi tenaga pelatihan dan Widyaiswara melalui pelatihan, in house training dan ToT.
7	Lemahnya sistem tracer study purnawidya pasca pelatihan	Proses pengambilan kebijakan berbasis data dan penyajian data kontribusi pelatihan terhadap sasaran strategis Kementerian menjadi terkendala	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan tata kelola sistem informasi monitoring purnawidya
8	Kesulitan jaringan internet peserta di daerah saat pelaksanaan pelatihan secara online	Materi kurang tersampaikan dengan baik kepada peserta	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan E-learning bagi peserta

No	Risiko Strategis	Dampak Terhadap sasaran	Tingkat Risiko *)	Strategi Mitigasi
9	Kurikulum pelatihan kadang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan	Tujuan pelatihan tidak tercapai	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan (IKP) sebelum pelatihan
10	Pemeliharaan sarana pelatihan belum dilakukan secara berkala	Kepuasan pengguna layanan terhadap sarana pelatihan balai menurun	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Mengalokasikan anggaran pemeliharaan sesuai dengan skala prioritas

2.6. Pohon Kinerja BBPP Batu

Pohon kinerja merupakan instrumen strategis untuk memastikan keterkaitan logis antara sasaran pembangunan nasional, kebijakan Kementerian Pertanian, hingga capaian kinerja unit kerja di lingkup BPPSDMP. Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021, penyusunan pohon kinerja melalui pendekatan sebab-akibat (*causal logic*) yang menggambarkan hubungan berjenjang antara *outcome*, *intermediate outcome*, *immediate outcome*, hingga *output* sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja.

Pada Renstra Kementerian Pertanian 2025–2029, terdapat 5 (lima) final *outcome* pembangunan sektor pertanian yang ingin di capai. Dari kelima *outcome* tersebut, BPPSDMP berkontribusi pada **Final Outcome 1, yaitu meningkatnya kesejahteraan petani**. Kontribusi ini menempatkan BPPSDMP sebagai pilar pembangunan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian *outcome* sektor pertanian lainnya dapat di lihat pada Gambar 14.

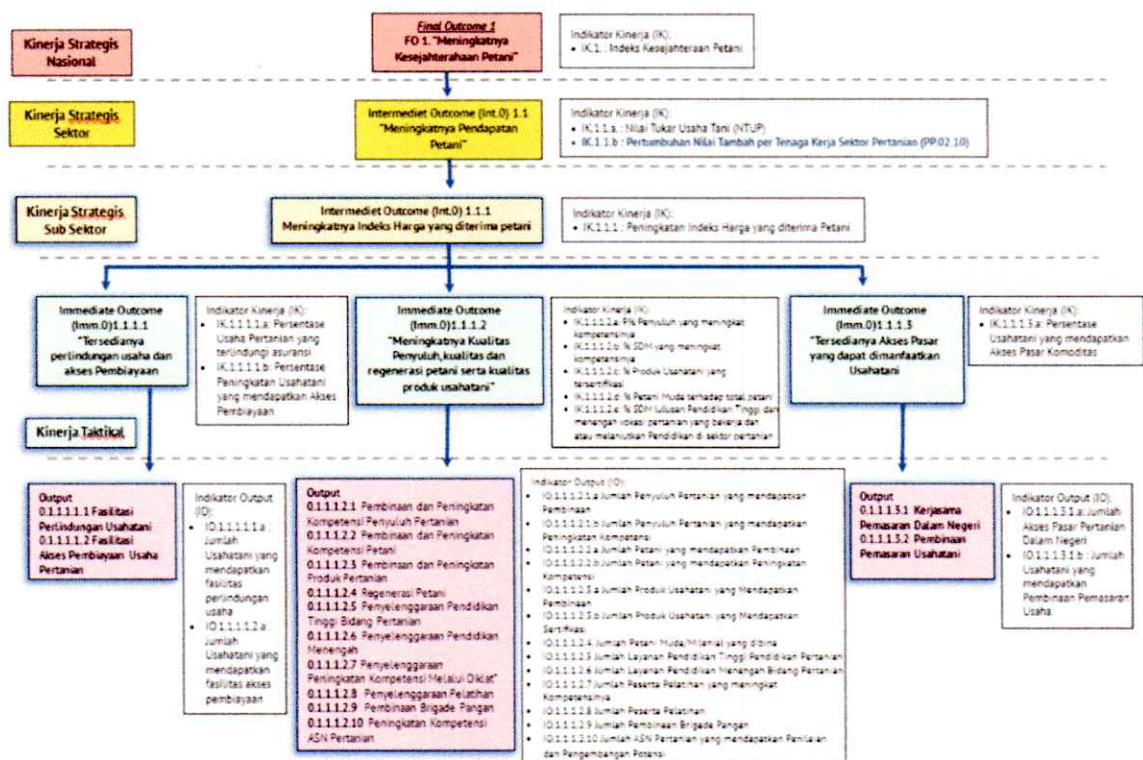


Gambar 14. Summary Pohon Kinerja Kementerian Pertanian 2025 - 2029

Dalam pohon kinerja, peningkatan kesejahteraan petani dicapai melalui **Intermediate Outcome** sektor berupa **meningkatnya pendapatan petani**, yang diukur antara lain melalui Nilai Tukar Usaha Tani (NTUP) dan pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian. *Intermediate outcome* tersebut selanjutnya diturunkan pada level subsektor menjadi **meningkatnya indeks harga yang diterima petani**, sebagai refleksi langsung dari perbaikan posisi ekonomi petani dalam sistem usaha tani dan pasar.

Pada level yang lebih operasional, pohon kinerja menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan dan harga yang diterima petani dipengaruhi oleh beberapa **Immediate Outcome** utama, yaitu:

1. tersedianya perlindungan usaha dan akses pembiayaan;
2. meningkatnya kualitas penyuluh pertanian dan kapasitas regenerasi petani;
3. tersedianya akses pasar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha tani



Gambar 15. Kontribusi BPPSDMP pada Pohon Kinerja Kementerian Pertanian

Berdasarkan Gambar 15, BPPSDMP berperan langsung dalam pencapaian *immediate outcome* tersebut melalui pelaksanaan berbagai **output pembangunan SDM pertanian** meliputi pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh pertanian, penyelenggaraan pendidikan vokasi pertanian melalui Polbangtan dan SMK-PP, pelatihan dan pendidikan nonformal, regenerasi petani, serta pembinaan

Brigade Pangan. Output-output ini dirancang untuk memperkuat kapasitas petani dan penyuluh, memperluas akses pembiayaan dan pasar, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas usaha tani.

BBPP Batu, sebagai salah satu UPT di bawah BPPSDMP, dalam struktur tersebut ber kontribusi pada pohon kinerja BPPSDMP secara **langsung dan terukur**. BBPP Batu berperan dalam pencapaian *immediate outcome* **Meningkatnya kualitas penyuluh, kualitas dan regenerasi petani serta kualitas produk usahatani** dengan Output berupa Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi Melalui Diklat dan Penyelenggaraan Pelatihan, dengan indikator output adalah Jumlah peserta pelatihan yang meningkat kompetensinya dan jumlah peserta pelatihan.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian 2025-2029

Arah kebijakan Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 selaras dengan RPJMN 2025–2029 yang menekankan penguatan ketahanan ekonomi melalui pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Swasembada pangan dalam kerangka tersebut ditetapkan sebagai prioritas strategis untuk menjamin ketersediaan pangan nasional yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing sektor pertanian sebagai pilar pembangunan ekonomi.

Pencapaian swasembada pangan diarahkan melalui implementasi Blueprint Swasembada Pangan 2024–2029 yang berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas komoditas utama melalui intervensi hulu–hilir, antara lain cetak sawah dan perluasan areal tanam, optimasi lahan dan peningkatan indeks pertanaman, penyediaan benih unggul, perbaikan irigasi, modernisasi alat mesin pertanian, serta peningkatan produksi susu dan daging nasional. Proyek strategis nasional di bidang pertanian menjadi bagian integral dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan pokok.

Kebijakan pertanian juga diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk melalui penguatan agroindustri berbasis wilayah. Sejalan dengan agenda hilirisasi nasional, komoditas strategis seperti kopi, kakao, kelapa, kelapa sawit, dan ubi kayu didorong masuk ke rantai pasok industri melalui penguatan pascapanen, fasilitasi investasi, serta kemitraan dengan pelaku usaha dan UMKM.

Strategi peningkatan produksi protein hewani untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat ditempuh melalui pengembangan subsektor peternakan, termasuk pembibitan, peningkatan populasi ternak, dan investasi peternakan berkelanjutan. Upaya tersebut dilengkapi dengan ketahanan pangan berbasis komunitas melalui optimalisasi pekarangan sebagai sumber pangan bergizi dalam rangka penurunan stunting dan penguatan ketahanan pangan keluarga.

Kementerian Pertanian juga mendukung transisi energi nasional melalui percepatan program mandiri energi berbasis biodiesel dengan peningkatan produksi CPO dan implementasi campuran B-50 menuju B-100. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, menstabilkan harga komoditas sawit, serta memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Strategi terintegrasi secara keseluruhan diarahkan untuk mewujudkan swasembada pangan secara bertahap dan terukur selama Tahun 2025–2029, sekaligus memberikan

kontribusi nyata terhadap ketahanan nasional, pembangunan berkelanjutan, dan penguatan ekonomi rakyat.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian memuat program untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pertanian nasional yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah. Implementasi arah kebijakan dan strategi memiliki dampak yang besar terhadap capaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian 2025-2029. Perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian dilakukan mengacu dan menjabarkan RPJMN 2025-2029 terkait dengan pertanian.

Kerangka yang digunakan dalam perumusan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian yaitu rumah strategi. Pendekatan rumah strategi dimulai dengan merumuskan atap (kuning) yang akan diterjemahkan sebagai tujuan akhir atau visi Kementerian Pertanian yang akan terwujud jika tujuan antara dapat tercapai (merah). Kelima hasil antara dapat tercapai jika kedelapan pilar (hijau) dapat terlaksana. Pelaksanaan kedelapan pilar yang efektif dan efisien perlu didukung oleh fondasi yang kuat (biru). Penjabaran lebih detail mengenai rumah strategi Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Gambar 16



Gambar 16 . Rumah Strategi Kementerian Pertanian

Kerangka arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025–2029 dituangkan dalam **Rumah Strategi Kementerian Pertanian** pada Gambar 16. Rumah strategi tersebut menggambarkan keterkaitan yang utuh antara visi, tujuan antara, pilar pembangunan, dan fondasi pendukung yang membentuk satu kesatuan sistem pembangunan pertanian yang maju dan berkelanjutan. Kementerian Pertanian dalam kerangka ini menetapkan **lima tujuan antara** yang ingin dicapai, yaitu:

1. Pertumbuhan volume usaha pertanian;
2. Kemandirian pangan asal pertanian;
3. Pemenuhan kebutuhan bahan baku bioenergi;
4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian; dan
5. Terjaganya kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit hewan menular.

Pencapaian kelima tujuan antara tersebut mensyaratkan ditegakkannya **delapan pilar utama pembangunan pertanian** secara terintegrasi dan berkelanjutan, yang meliputi:

1. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan produksi;
2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang modern, efisien, dan berkelanjutan;
3. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) sebagai basis Lumbung Pangan Nasional;
4. Pemanfaatan dan penguatan hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional untuk memperkuat rantai nilai;
5. Perlindungan usaha dan peningkatan akses pembiayaan pertanian;
6. Pengawasan kepatuhan terhadap penerapan tata kelola pertanian berkelanjutan;
7. Regenerasi petani serta pengembangan usaha tani yang tangguh dan berdaya saing; dan
8. Penguatan sistem kesehatan hewan nasional.

Pilar-pilar pembangunan pertanian dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan diperlukan **fondasi yang kokoh dan saling mendukung**, oleh karena itu, pembangunan pertanian nasional Tahun 2025–2029 ditopang oleh **lima fondasi utama**, yaitu:

1. Sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional yang produktif dan berdaya saing;
2. Reformasi birokrasi Kementerian Pertanian untuk mendukung tata kelola dan pelayanan publik yang efektif;
3. Standardisasi dan sertifikasi produk serta praktik pertanian sebagai penjamin mutu dan daya saing;
4. Pemanfaatan teknologi pertanian modern dalam seluruh tahapan usaha tani, mulai dari budidaya hingga pascapanen; dan

5. Penerapan tata kelola pertanian berkelanjutan yang mengacu pada *Good Agricultural Practices*, *Good Handling Practices*, *Good Farming Practices*, serta praktik baik lainnya.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPPSDMP 2025 - 2029

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dalam kerangka mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029 menetapkan kebijakan yang berorientasi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, kelembagaan, serta tata kelola birokrasi yang profesional. Kebijakan tersebut dirumuskan untuk menjawab kompleksitas tantangan pembangunan pertanian sekaligus memastikan keberlanjutan ketersediaan tenaga kerja pertanian yang berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Badan PPSDMP menfokuskan arah kebijakannya pada dua pokok utama berupa:

1. Peningkatan pendapatan petani dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia

Kebijakan ini dioperasionalkan melalui strategi:

- a) Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani berbasis kompetensi melalui penyuluhan serta penguatan modal manusia (*human capital*) pertanian; dan
- b) Pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara di bidang pertanian, disertai peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian nasional agar lebih adaptif, produktif, dan berkelanjutan

2. Penguatan tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi implementasi reformasi birokrasi BPPSDMP untuk mewujudkan prinsip *good governance* dan *clean governance* dalam setiap aspek penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Arah kebijakan dan strategi tersebut menegaskan bahwa pembangunan SDM pertanian 2025– 2029 tidak hanya diarahkan pada peningkatan kuantitas tenaga kerja pertanian, tetapi juga pada penguatan kualitas melalui peningkatan kompetensi, integritas, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim, dinamika pasar, serta perkembangan teknologi pertanian modern. Dalam kerangka ini, penyuluh pertanian diposisikan sebagai ujung tombak pembangunan, sementara birokrasi yang bersih dan profesional menjadi prasyarat bagi terselenggaranya pelayanan publik yang efektif di bidang penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian.

BPPSDMP pada Tahun 2025–2029 berperan strategis sebagai penggerak utama dalam regenerasi petani, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, dan penguatan tata kelola kelembagaan yang berintegritas. Peran tersebut diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan pertanian nasional, khususnya peningkatan volume usaha pertanian dan terwujudnya kesejahteraan petani Indonesia secara berkelanjutan.

3.3. Strategi Operasional BBPP Batu 2025 – 2029

BBPP Batu dalam mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi BPPSDMP Tahun 2025 – 2029, menyusun strategi operasional sesuai dengan mandat, fungsi dan kapasitas Balai.

Strategi dan langkah operasional yang ditempuh untuk meningkatkan daya saing dan kinerja BBPP Batu meliputi:

1. Program peningkatan kompetensi Widyaiswara dan Tenaga Kepelatihan melalui sertifikasi bertaraf Internasional;
2. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pelatihan serta membenahi sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan Standar Pelatihan Internasional;
3. Pengembangan sistem penyelenggaraan pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
4. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi peserta pelatihan dalam negeri dan luar negeri;
5. Penyusunan program materi pelatihan internasional yang menarik bagi negara donor;
6. Menggunakan Standar Kompetensi Kerja Internasional sebagai referensi penyelenggaraan;
7. Dukungan Alokasi Pendanaan Pelatihan yang bertaraf Nasional dan Internasional yang dapat memberi dampak luas dan cepat serta memberikan penjaminan mutu bagi peserta pelatihan (sistem pelatihan berjenjang);
8. Tersusunnya bahan ajar yang mendukung sistem pelatihan berjenjang;
9. Mengembangkan Sistem Pendampingan BBPP Batu (optimalisasi fungsi Outlet PIA sebagai klinik konsultasi);
10. Mengembangkan sistem Bimbingan Lanjutan;
11. Melakukan Koordinasi Kebijakan Pusat Penyuluhan dan Pusat Pendidikan;
12. Melakukan Pembinaan serta penguatan kelembagaan P4S Binaan Balai

3.4. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan di BBPP Batu. Adapun regulasi yang menjadi payung hukum kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan;
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/ 2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian;
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milk Negara;
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT.140/2/ 2015 tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/Ot.080/4/2018 Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, Dan tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
- m. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 11 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja UPT Lingkup Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian;
- n. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian:

- o. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- p. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 168/Kpts/SM.120/I/09/2025 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Mutu Penyelenggara Pelatihan;
- q. Surat Menteri Keuangan Nomor S-748/MK.02/2021 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Negara/ Lembaga;

3.5. Kerangka Kelembagaan

Dalam mewujudkan struktur pemerintahan yang efisien dan efektif, mempercepat agenda reformasi birokrasi, dan secara khusus adalah untuk menopang Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar Pelatihan Pertanian maka diperlukan SDM aparatur yang andal, serta menerapkan nilai dasar/*Core Values* ASN yaitu '**BerAKHLAK**': Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja BBPP Batu Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029, target kinerja didefinisikan sebagai penjelasan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Definisi tersebut berlaku untuk seluruh tingkatan indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, maupun indikator kinerja kegiatan.

Tahun 2025 – 2029 target kinerja BPPSDMP di jabarkan kedalam satu sasaran program yaitu **“Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani”**. Pencapaian sasaran program tersebut di ukur dengan satu indikator kinerja program yaitu Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas dengan satuan persentase (%). Dengan penetapan sasaran dan indikator kinerja tersebut, BPPSDMP mendorong transformasi pelaku usaha pertanian menuju skala usaha yang lebih tinggi secara bertahap dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi Kementerian Pertanian, khususnya dalam meningkatkan profesionalisme, produktivitas, dan kesejahteraan petani serta pelaku agribisnis secara berkelanjutan.

Perumusan target kinerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Tahun 2025 – 2029 dilakukan melalui pendekatan dan penerjemahan pohon kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Pendekatan ini dalam rangka memastikan keselarasan vertikal antara target sasaran kegiatan BBPP Batu dengan Sasaran Program BPPSDMP serta memastikan kontribusi langsung BBPP Batu terhadap perwujudan visi dan misi BPPSDMP.

Penetapan target kinerja yang jelas diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran dapat diukur serta dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Oleh karena itu, setiap indikator kinerja harus dilengkapi dengan target kinerja yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai secara kuantitatif dalam periode Renstra.

Berdasarkan Sasaran Program BPPSDMP, target kinerja BBPP Batu periode tahun 2025-2029 di jabarkan kedalam 2 sasaran kegiatan yaitu 1). Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan) dengan satuan presentase (%) dan 2). Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan dengan satuan skala likert (1-5). Secara rinci target kinerja BBPP Batu periode tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 4. Target Kinerja BBPP Batu Tahun 2025 – 2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)	Rata – rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)	%	20	18	16	14	12
		Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)	%	25	23	21	19	17
2	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	Skala likert (1-5)	4	4,1	4,2	4,3	4,4

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERTANIAN													
KRO	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan												
RO	Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Aparatur	Orang	175	1.399	1.468	1.542	1.619						
RO	Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Non Aparatur	Orang	8.158	3.520	3.696	3.880	4.074						
KRO	Sertifikasi Profesi dan SDM												
RO	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	Orang	20	80	100	120	140						
KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga												
RO	Penumbuhan dan Penguatan P4S	Lembaga	-	4	8	12	16						
SK. 2	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan												
IKSK 1	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	Skala Likert	4	4.1	4.2	4.3	4.4						
KRO	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup												
RO	Sarana Pelatihan Pertanian	Unit	1	1	1	1	1						
			15.416,844	18.952.103	19.899.708	20.894.693	21.939.428						

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)										
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029						
	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERTANIAN																	
KRO	Prasarana Bidang Pertanian, Kehuatan dan Lingkungan Hidup													15.416,844	18.952.103	19.899.708	20.894.693	21.939.428
RO	Prasarana Pelatihan Pertanian	Unit	-	1	1	1	1											

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis BBPP Batu Tahun 2025 – 2029 yang menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan, disusun dengan mengacu kepada: 1) hasil kinerja Balai yang telah dicapai pada periode 2020 – 2024, 2) permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan 3) Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2025 – 2029.

Penyusunan Renstra BBPP Batu Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber daya Manusia Peternakan yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing dan Berjiwa Wirausaha dalam mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern.

Renstra BBPP Batu Tahun 2025 – 2029 harus diimplementasikan dengan baik pada unit kerja BBPP Batu dalam upaya mewujudkan visi dan misi BPPSDMP. Diperlukan komitmen, tekad dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua unsur terkait dalam upaya mengimplementasikan langkah-langkah operasional sesuai dengan kewenangan dan fungsi masing-masing. Renstra ini menjadi acuan bagi BBPP Batu untuk menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan petani.